

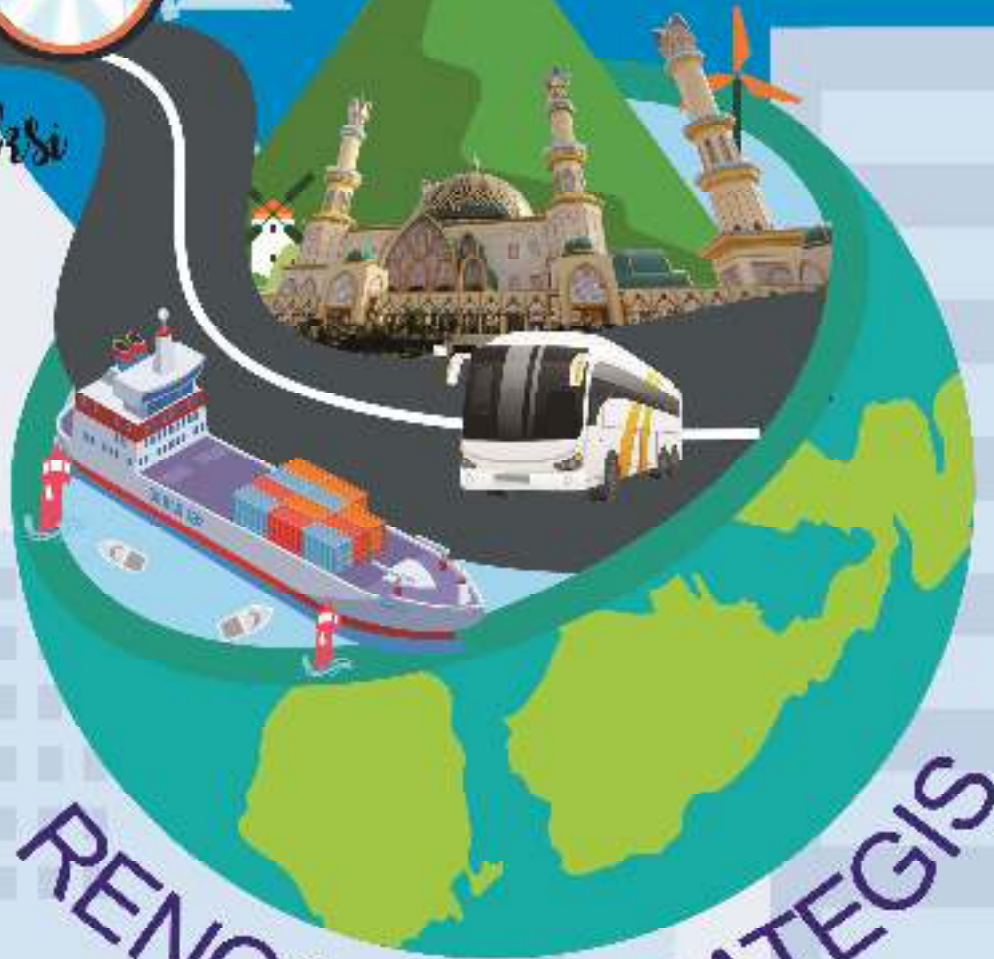


Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



NTB Terkoneksi

REVISI REN STRA 2019-2023



RENCANA STRATEGIS



Dinas Perhubungan
Provinsi NTB



dishubntb



dishub.ntbprov.go.id

Edisi Juni 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan review dokumen Rencana Strategis Lima Tahun (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam perencanaan Dinas Perhubungan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta rencana pendanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan di dalam Renstra Dinas Perhubungan bertujuan untuk mendukung target capaian indikator pada RPJMD Provinsi NTB, terutama pada Misi I - NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur sektor unggulan serta konektivitas wilayah.

Semoga Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan di Provinsi NTB. Semoga sektor perhubungan dapat berkontribusi nyata untuk mendukung visi NTB Gemilang di Provinsi NTB.

Mataram, Juni 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Lalu M. Faozal, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661231 198608 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANANDINAS PERHUBUNGAN	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	32
2.2.1. Susunan Kepegawaian	32
2.2.2. Aset Yang Dikelola.....	33
2.2.3. Kondisi Insfrastruktur Dinas Perhubungan.....	34
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	47
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015 - 2019	47
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	60
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISDINAS PERHUBUNGAN.....	61
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	62
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	64
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	67
3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan.....	67
3.3.2. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-NTB.....	69
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD.....	69
3.5. PenentuanIsu-Isu Strategis	74
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	77



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan.....	77
4.1.1. Tujuan.....	77
4.1.2. Sasaran	77
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
5.1 Strategi	80
5.2 Arah Kebijakan	82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	85
6.1. Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019-2020 Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	85
6.2. Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021-2023 Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019	86
6.3. Program Unggulan Daerah, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif	101
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	105
BAB VIII PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	32
Tabel 2.2	Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTB.....	33
Tabel 2.3	Data Terminal per Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.....	36
Tabel 2.4	Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2019.....	38
Tabel 2.5	Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	38
Tabel 2.6	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB Tahun 2015 – 2019	41
Tabel 2.7	Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019.....	42
Tabel 2.8	Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.....	44
Tabel 2.9	Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019	46
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2015 – 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	48
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019 Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	55
Tabel 2.12	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	60
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	62
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi NTB Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga.....	68
Tabel 3.4	Isu - Isu Strategis Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	75
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan.....	79

Tabel 4. 2	Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran Dishub Provinsi NTB	79
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB	83
Tabel 6.1	Rencana Program & Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2020	87
Tabel 6.2	Rencana Program & Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023	92
Tabel 6.3	Program Unggulan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif.....	102
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023.....	105
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	8
Gambar 2. 2 Prasarana Transportasi di NTB.....	37
Gambar 3.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan hasil evaluasi Renstra periode 5 (lima) tahun sebelumnya, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu SKPD memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023 yaitu "**Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang**".

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan lingkup temporal 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD. Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 telah berjalan hampir dua tahun dan di tahun ketiga berdasarkan ketentuan yang berlaku melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap berbagai situasi dan kondisi seperti munculnya wabah Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), selain itu terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja, indikator program, strategis kebijakan dan program prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi .

Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya catatan dari hasil review Kementerian PANRB yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah dalam

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Rencana Strategis berupa dokumen perencanaan taktis strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas dan merupakan strategi untuk mewujudkan visi dan misi daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Sehubungan hal tersebut maka naskah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13-376/2019).
 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No Tahun 2020 Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 -2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ini adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mangacu pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan periode 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah:

1. Menentukan arah program pembangunan sektor transportasi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
2. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja dan RKT) pada Dinas Perhubungan.
3. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja Dinas Perhubungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan adalah sebagaiberikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RenstraDinas Perhubungan serta sistematika penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Memuat informasi tentang struktur, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RenstraDinas Perhubungan periode sebelumnya.

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan. Pada bagian ini dikemukakan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini berisi strategi dan arah kebijakan dari Dinas Perhubungan untuk jangka menengah.

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bagian ini berisi rencana program dan kegiatan dan pendanaan Dinas Perhubungan selama 5 tahun.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini berisi capaian kinerja dalam 5 tahun ke depan sebagai ikhtiar untuk mencapai sasaran dan tujuan Renstra Dinas Perhubungan.

BAB. VIII PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran dari Renstra Dinas Perhubungan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANANDINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan ke empat atas peraturan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan di daerah Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggaraan Kegiatan Sekretariat;
2. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Jalan ;
3. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Angkutan jalan;
4. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pelayaran;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan memiliki susunan organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dengan struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa lalu Lintas;
 - b. Seksi Prasarana Lalu Lintas ; dan
 - c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan jalan, terdiri atas :
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - b. Seksi Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa Khusus; dan

- c. Seksi Pengelolaan Terminal.
- 5. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
 - a. Seksi Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhanan; dan
 - c. Seksi Angkutan Penyeberangan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
 - b. Jabatan Fungsional Arsiparis
 - c. Jabatan Fungsional Perencana

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Rincian tugas dan fungsi Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV pada Dinas Perhubungan:

1. Kepala Dinas

Ringkasan Tugas:

Memimpin, menyelenggarakan, mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan di bidang perhubungan yang merupakan urusan pemerintahan provinsi, tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis sistem transportasi berkelanjutan dan rencana kerja dinas perhubungan;
2. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan; Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
3. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
4. Menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan;
5. Memfasilitasi pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem transportasi darat dan laut;
6. Mengkoordinasikan transportasi udara dan operasional bandar udara di Provinsi NTB;
7. Mengembangkan sistem transportasi perkotaan dan perdesaan yang mengarusutamakan perubahan iklim, gender, dan disabilitas;
8. Menyenggarakan perhubungan darat, penyeberangan dan laut;
9. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan;
10. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
11. Melakukan penghitungan, pengawasan dan evaluasi tarif angkutan jalan, penyeberangan, dan laut;

12. Melakukan penataan, penetapan dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan;
13. Melaksanakan pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi;
14. Melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan dan retribusi di bidang perhubungan darat, penyeberangan, dan laut;
15. Melaksanakan upaya keselamatan prasarana dan sarana perhubungan darat, penyeberangan, dan laut;
16. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin di bidang Perhubungan;
17. Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan;
18. Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan;
19. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang Perhubungan;
20. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perhubungan;
21. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
22. Melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perhubungan; dan
23. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Rincian Fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis sistem transportasi berkelanjutan dan rencana kerja dinas perhubungan;
2. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan;
3. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;

4. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan;
5. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem transportasi darat dan laut;
6. Pengkoordinasian transportasi udara dan operasional bandar udara di Provinsi NTB;
7. Pengembangan sistem transportasi perkotaan dan perdesaan yang mengarusutamakan perubahan iklim, gender, dan disabilitas;
8. Penyelenggaraan perhubungan darat, penyeberangan dan laut;
9. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan;
10. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
11. Penghitungan, pengawasan dan evaluasi tarif angkutan jalan, penyeberangan, dan laut;
12. Penataan, penetapan dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan;
13. Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi;
14. Pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan, retribusi di bidang perhubungan darat, penyeberangan, dan laut;
15. Pelaksanaan upaya keselamatan prasarana dan sarana perhubungan darat, penyeberangan, dan laut;
16. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang Perhubungan;
17. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan;
18. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan;
19. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang Perhubungan;
20. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Perhubungan;

21. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perhubungan;
22. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perhubungan; dan
23. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Sekretariat

Ringkasan Tugas :

Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Perhubungan.

Rincinan Tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan regulasi teknis terkait bidang perhubungan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan;
3. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
4. Menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
5. Mengelola teknologi informasi Dinas Perhubungan;
6. Mengelola kepegawaian, pembinaan dan pengembangan SDM Perhubungan;
7. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dan barang Dinas Perhubungan;
8. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, publikasi kegiatan dan surat menyurat Dinas Perhubungan ;
9. Mengelola kearsipan Dinas Perhubungan;
10. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan;
11. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Rincinan Tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan regulasi teknis terkait bidang perhubungan;

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan;
3. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan;
4. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
5. Pengelolaan teknologi informasi Dinas Perhubungan;
6. Pengelolaan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan SDM Perhubungan;
7. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dan barang Dinas Perhubungan;
8. Pelaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, publikasi kegiatan dan surat menyurat Dinas Perhubungan ;
9. Pengelolaan kearsipan Dinas Perhubungan;
10. Perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan;
11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

2.1. Sub Bagian Program

Ringkasan Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program / kegiatan Dinas;

Rincian Tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
2. Melaksanakan Penyusunan dokumen Perencanaan dan program kegiatan pelayanan unit kerja di lingkungan Dinas (Renstra, Renja, RKT, IKU, RKA/ DPA/ RKAP/DPPA);
3. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas. (LKPJ, LPPD, RKPJ):
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap

- pelaksanaan program kerja Dinas. (LKjIP, Laporan Tahunan , Monev);
5. Melaksanakan pengelolaan Informasi teknologi (IT) Dinas (KPID, Website Dishub).

2.2. Sub Bagian Keuangan

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan;

Rincian Tugas:

1. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
2. Menyiapkan bahan usulan pengelola keuangan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan;
4. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan;
5. Memverifikasi dokumen keuangan;
6. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta menyiapkan tindak lanjut;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas :

Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan aset dan kerumahtanggaan.

Rincian Tugas:

1. Mengelola kepegawaian, pembinaan dan pengembangan SDM Perhubungan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengembangan kapasitas pegawai;
3. Menyiapkan bahan – bahan kelengkapan administrasi barang milik daerah;

4. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, publikasi dan surat menyurat;
5. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dan barang;

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan kegiatan lalu lintas serta perumusan kebijakan di bidang lalu lintas demi tercapainya keselamatan pengguna lalu lintas dengan menyediakan fasilitas perlengkapan jalan serta pengendalian lalu lintas Jalan Provinsi.

Rincian Tugas:

1. Menetapkan rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
2. Menyediakan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
3. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
4. Memberikan Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
5. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan provinsi
Penyajian data Bidang Lalu Lintas;
6. Menyajikan data Bidang Lalu Lintas.

Rincian Fungsi:

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
4. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
5. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan provinsi;
6. Penyajian data Bidang Lalu Lintas;

3.1. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas

Rincian Tugas:

1. Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
2. Menyusun bahan penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
3. Melaksanakan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
4. Menyiapkan Bahan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi;
5. Melaksanakan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
6. Mengkoordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil andalalin
7. Mengawasi Pelaksanaan Rekomendasi andalalin;

3.2. Kepala Seksi Prasarana Lalu Lintas

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan prasarana lalu lintas.

Rincian Tugas:

1. Menyusun perencanaan prasarana lalu lintas;
2. Membangun Prasarana Jalan di Jalan Provinsi;
3. Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
4. Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
5. Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
6. Melaksanakan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

3.3. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan, dan sosialisasi keselamatan lalu lintas.

Rincian Tugas:

1. Melaksanakan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
2. Meningkatkan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;
3. Melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
6. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi;
7. Menyusun bahan berita acara hasil penelitian fisik kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor;
8. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
9. Melaksanakan kegiatan analisis kecelakaan terhadap teknis kendaraan bermotor;
10. Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi keselamatan;

4. Kepala Bidang Angkutan Jalan**Ringkasan Tugas :**

Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan penyelenggaraan kegiatan angkutan jalan, angkutan orang dalam trayek dan barang, angkutan orang tidak dalam trayek dan sewa khusus serta pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan di wilayah Provinsi serta menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di Terminal Penumpang Tipe B serta berkoordinasi dengan Terminal Penumpang Tipe A dan Tipe C

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;

2. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
3. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dan angkutan taksi serta sewa khusus dalam 1 (Satu) Provinsi;
4. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan perkotaan yang Melampaui batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
5. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
6. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
7. Fasilitasi bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
8. Penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
9. Pengelolaan terminal tipe B;
10. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi pengelolaan terminal;
11. Penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
12. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;
13. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penetapan trayek/rute baru transportasi darat;
14. Menyiapkan bahan kajian teknis rencana jaringan multi moda transportasi;
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan pengelolaan terminal tipe A dan tipe C;
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan penyelenggaraan

- angkutan barang;
17. Memfasilitasi pengecekan kendaraan pribadi;
 18. Menyediakan teknologi informasi angkutan jalan;

Rincian Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan rencana program kerja dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Angkutan orang dan barang, serta pemanduan moda dan pengembangan;
2. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Bidang Angkutan orang dan barang, serta pemanduan moda dan pengembangan;
3. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
5. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
6. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
7. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
8. Penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan perintis;
9. Penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan;
11. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengembangan transportasi darat di Terminal Penumpang Tipe B;

12. Persetujuan rekomendasi teknis persetujuan operasional terminal tipe B;
13. Penyiapan bahan rekomendasi teknis penetapan trayek/rute baru transportasi darat;
14. Penyiapan bahan kajian teknis rencana jaringan multi moda transportasi;
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan pengelolaan terminal tipe A dan tipe C;
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan penyelenggaraan angkutan barang;
17. Fasilitasi pengecekan kendaraan pribadi;
18. Penyediaan teknologi informasi angkutan jalan;

4.1. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pada rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang di jalan antar kota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antar kota antar provinsi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;
2. Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
3. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi;
4. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi dan perkotaan yang Melampaui batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

6. Melaksanakan penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Mengendalikan pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
8. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
9. Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
10. Menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
11. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor umum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Menyajikan data pada seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;
14. Melaksanakan teknologi informasi pada seksi angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang;

4.2. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa Khusus

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, perizinan angkutan orang

angkutan antar jemput antar kota dalam provinsi, serta fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
2. Menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
3. Menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. Menyiapkan bahan penetapan persetujuan tarif taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Menyiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
6. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
7. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
8. Menyajikan data pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
9. Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;
10. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor umum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Melaksanakan teknologi informasi pada seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;

12. Melaksanakan evaluasi, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas seksi angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan sewa khusus;

4.3. Kepala Seksi Pengelolaan Terminal

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di Terminal Penumpang Tipe B Wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa guna pengembangan terminal, memberikan rekomendasi teknis penetapan terminal Tipe B, melakukan urusan ketatausahaan dan administrasi umum di lingkungan Terminal Penumpang Tipe B Wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa;

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada seksi pengelolaan terminal;
2. Menata fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
3. Mengatur lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
4. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
5. Menyajikan daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
6. Menata pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
7. Menyusun jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
8. Mencatat jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
9. Mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan;
10. Mencatat setiap kendaraan bermotor umum;
11. Melaksanakan pemungutan jasa pelayanan terminal;
12. Memberitahukan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya;
13. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;

14. Melaksanakan pemeriksaan kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
15. Melaksanakan pemeriksaan dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
16. Melaksanakan pemeriksaan kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan;
17. Melaksanakan pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang;
18. Melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum;
19. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum (rampcheck);
20. Melaksanakan pemeriksaan identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelataran;
21. Melaksanakan pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum;
22. Berkoordinasi dengan terminal tipe A dan tipe C;
23. Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
24. Melaksanakan teknologi informasi pada seksi pengelolaan terminal;
25. Menyajikan data pada seksi pengelolaan terminal;
26. Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi pengelolaan terminal;

5. Kepala Bidang Pelayaran

Ringkasan Tugas :

Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan koordinasi kegiatan angkutan perairan, angkutan penyeberangan, keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan penggunaan ruang laut kewenangan provinsi.

Rincian Tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Perhubungan Pelayaran;
2. Mengkoordinasikan, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi

- pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayaran;
3. Memfasilitasi perijinan angkutan Laut pada lintas pelabuhan antar - Daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi;
 4. Menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya, Menetapkan Jadwal, Menetapkan Lintasan angkutan penyeberangan, pada lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
 5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan angkutan penyeberangan dan perizinan serta pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
 6. Melaksanakan pembangunan, dan memfasilitasi perijinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 7. Melaksanakan Penyelenggara pelabuhan pengumpan regional dan Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan antar kota / kabupaten dalam provinsi;
 8. Memfasilitasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
 9. Mengawasi dan Membina angkutan penyeberangan serta pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
 10. Menetapkan Jadwal dan Menerbitkan Standar Pelayanan Minimal angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
 11. Memfasilitasi Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
 12. Membangun, dan memfasilitasi persetujuan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 13. Pembangunan dan memfasilitasi persetujuan izin pelabuhan penyeberangan yang melayani trayek lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
 14. Memfasilitasi Persetujuan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 15. Memfasilitasi Persetujuan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan

- pengumpulan regional;
16. Memfasilitasi Persetujuan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpulan regional;
 17. Memfasilitasi Persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional;
 18. Memfasilitasi Persetujuan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional;
 19. Memfasilitasi Persetujuan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional;
 20. Mengkoordinasi dengan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpulan dan pelabuhan penyebrangan antar provinsi;
 21. Memantau, Mengawasi, dan Mengevaluasi arus penumpang/barang/komoditi pada Pelabuhan di wilayah provinsi;
 22. Memberikan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang perairan kewenangan provinsi penetapan lokasi pelabuhan baru di wilayah provinsi;
 23. Menyajikan data bidang Pelayaran;
 24. Membuatkan laporan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pelayaran;

Rincian Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Perhubungan Pelayaran;
2. Pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayaran;
3. Fasilitasi izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar - Daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi;
4. Fasilitasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar - Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi, pelabuhan antar -Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
5. Fasilitasi Persetujuan izin trayek penyelenggaraan angkutan penyebrangan

- untuk kapal yang melayani trayek antar -Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi;
6. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
 7. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 8. Fasilitasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
 9. Pengawasan dan pembinaan angkutan penyeberangan serta pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
 10. Penetapan Jadwal dan Penerbitan Standar Pelayanan Minimal angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
 11. Fasilitasi Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
 12. Pembangunan, dan fasilitasi persetujuan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 13. Pembangunan dan fasilitasi persetujuan izin pelabuhan penyeberangan yang melayani trayek lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
 14. Fasilitasi Persetujuan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 15. Fasilitasi Persetujuan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
 16. Fasilitasi Persetujuan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
 17. Fasilitasi Persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 18. Fasilitasi Persetujuan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;

19. Fasilitasi Persetujuan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
20. Koordinasi dengan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan dan pelabuhan penyebrangan antar provinsi;
21. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi arus penumpang/barang/komoditi pada Pelabuhan di wilayah provinsi;
22. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan ruang perairan kewenangan provinsi penetapan lokasi pelabuhan baru di wilayah provinsi;
23. Penyajian data bidang Pelayaran;
24. Pembuatan laporan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Pelayaran;

5.1. Kepala Seksi Angkutan Laut

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan dan Penyelenggaraan angkutan perairan yang wilayah operasinya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Angkutan Laut;
2. Fasilitasi persetujuan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi;
3. Fasilitasi persetujuan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasin pada lintas pelabuhan antar -Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi, pelabuhan antar -Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
4. Fasilitasi persetujuan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
5. Melakukan kajian kebutuhan angkutan laut antarkab/kota dalam provinsi;
6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Provinsi ;

7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat kewenangan Provinsi;
8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas;
9. Menyajikan data pada seksi Angkutan Laut;
10. Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Angkutan Laut.

5.2. Kepala Seksi Kepelabuhanan

Ringkasan Tugas :

Menyetujui penetapan rencana induk DLKR/DLKP, memproses izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan, memproses izin pengembangan untuk pelabuhan pengumpul, memproses izin pengoperasian pelabuhan selama dua puluh empat jam untuk pelabuhan pengumpul regional, memberi rekomendasi terkait izin pengerukan dan reklamasi pelabuhan regional, memproses izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, melakukan pengkajian, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana keselamatan laut dan melaksanakan tugas sesuai perintah pimpinan.

Rincian Tugas:

1. Fasilitasi persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul regional;
2. Penyiapan bahan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
3. Pembangunan, dan persetujuan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
4. Pembangunan dan persetujuan izin pelabuhan penyeberangan yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
5. Fasilitasi persetujuan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan

- pengumpulan regional;
6. Fasilitasi persetujuan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpulan regional;
 7. Fasilitasi persetujuan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpulan regional;
 8. Fasilitasi Persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional;
 9. Fasilitasi Persetujuan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional;
 10. Fasilitasi Persetujuan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional;
 11. Fasilitasi persetujuan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional;
 12. Fasilitasi izin pengoperasian pelabuhan selama dua puluh empat jam untuk pelabuhan pengumpul regional;
 13. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitas kepelabuhan;
 14. Menyelenggarakan pengawasan, pendataan dan evaluasi fasilitas kepelabuhan;
 15. Pertimbangan teknis penggunaan ruang laut kewenangan provinsi;
 16. Menyajikan data pada seksi kepelabuhanan;
 17. Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi kepelabuhanan;

5.3. Seksi Angkutan Penyeberangan

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan manajemen angkutan penyeberangan, melaksanakan kegiatan, penyuluhan dan pembinaan pengguna angkutan penyeberangan di wilayah provinsi NTB.

Rincian Tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Angkutan Penyeberangan;
2. Menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas

- pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi;
3. Menyediakan bahan rekomendasi teknis persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan antardaerah kab/kota dalam daerah provinsi;
 4. Melaksanakan pemantuan dan evaluasi arus penumpang/barang/komoditi pada pelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota di wilayah Provinsi;
 5. Melaksanakan pemantauan dan pendataan fasilitas pelabuhan penyeberangan;
 6. Menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam daerah Provinsi;
 7. Melaksanakan pemantauan pada lokasi berdasarkan laporan terhadap rencana pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan;
 8. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis penetapan lokasi lintas angkutan penyeberangan baru di wilayah provinsi;
 9. Melakukan kajian kebutuhan angkutan penyeberangan lintas kab/kotan dalam provinsi;
 10. Melakukan penetapan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan lintas kabupaten / kota dalam provinsi;
 11. Menyusun jadwal kapal penyeberangan lintas kab/kota dalam provinsi;
 12. Melakukan monitoring dan pengawasan pelayanan angkutan penyeberangan lintas kab/kota dalam provinsi;
 13. Menyajikan data pada Seksi Angkutan Penyeberangan;
 14. Membuat laporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Angkutan Penyeberangan;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

6.1. Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas pokok merencanakan, menganalisa, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

6.2. Jabatan Fungsional Arsiparis

Fungsional Arsiparis mempunyai tugas pokok :

- Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
- Pembinaan kearsipan;
- Pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi.

6.3. Jabatan Fungsional Perencana Madya

Jabatan Fungsional Perencana Madya mempunyai tugas pokok menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Posisi September 2020 adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Data Pegawai menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Unit Kerja	Golongan				Pendidikan							Jenis Kelamin		Jumlah
	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D- III	S1	S2	S3	L	P	
Kepala	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sekretariat	-	14	9	2	-	-	5	10	7	2	1	15	10	25
Bid. Angkutan Darat	-	8	9	1	-	-	-	10	7	1	-	16	2	18
Bid. Terminal	1	5	8	1	1	-	6	1	5	2	-	11	4	15
Bid. Angkutan Laut dan Udara	-	3	7	-	-	-	3	2	4	1	-	7	3	10
Fungsional	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2
CPNS	-	1	4	-	-	-	-	1	4	-	-	3	2	5
Pegawai Tidak Tetap	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	3
Jumlah	1	35	38	5	1	-	5	24	27	8	1	57	22	79

Sumber : Dinas Perhubungan (data per September 2020)

Dari data tabel 2.1 dapat dilihat gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualitas dan kuantitas masih kurang memadai, formasi yang ada saat ini sebanyak 79 orang yang terdiri dari 71 orang PNS, 5 orang CPNS dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap. Dengan komposisi SDM tersebut Dinas Perhubungan masih memerlukan SDM yang berkompeten dibidangnya yang memiliki kualifikasi pendidikan bidang perhubungan khususnya Bidang Perhubungan Laut.

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola Dinas Perhubungan yang mencakup jenis aset, jumlah, kondisi, tahun dan nilai perolehan serta lokasi tergambar dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTB

No	Aset	Jumlah Satuan	Keadaan
1	Perlengkapan Barang Bergerak		
	- Roda 4	14 Kendaraan	4 Rusak Berat
	- Roda 2	31 Kendaraan	11 Rusak Berat
2	Perlengkapan Barang Tidak Bergerak		
	- Tanah	20 Lokasi	172.742 M ²
	- Bangunan	49 Lokasi	Baik
	- Baliho	19 Buah	Baik
3	Perlengkapan Barang Elektronik		
	- Pesawat Telepon	6 Buah	6 Rusak
	- Radio Komunikasi	9 Buah	9 Rusak
	- Televisi	4 Buah	Baik
	- Komputer Portable	50 Unit	14 Rusak
	- Laptop/notebook	19 Unit	9 Rusak
	- Printer	34 Unit	22 Rusak
	- Sound System	2 Unit	Baik
	- Wireles	12 Unit	Baik
	- UPS	8 Unit	8 Rusak
	- Kamera	8 Buah	6 Rusak
	- Menara Antena	2 Buah	
4	Perlengkapan Kantor		
	- Meja	318 Meja	250 Rusak
	- Kursi	815 Kursi	640 Rusak

No	Aset	Jumlah Satuan	Keadaan
	- Mesin Tik	33 Buah	31 Rusak
	- Lemari	92 Buah	51 Rusak
	- Mesin Potong Rumput	5 Unit	3 Rusak
5	Perlengkapan Keamanan Jalan		
	- Marka Jalan P. Lombok	62.460,6 m ²	Baik
		88.361,4 m ²	Kurang baik
	- Marka Jalan P. Lombok	858 m ²	Baik
		272.958,6 m ²	Kurang baik
	- Pagar Pengaman Jalan	900 m'	Baik
		1100 m'	Kurang baik
	- Rambu Lalu Lintas	3.180 buah	Baik
	- RPPJ	120 buah	Baik
	- Warning Light	8 buah	Baik
	- Traffic Light	3 Unit	2 unit buruk, 1 unit Baik

Sumber : Dinas Perhubungan

2.2.3. Kondisi Infrastruktur Dinas Perhubungan

Sistem jaringan transportasi provinsi terdiri dari sistem jaringan transportasi nasional yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi yang meliputi sistem transportasi darat, laut dan udara.

Pembangunan transportasi di Provinsi NTB diarahkan pada peningkatan ketersediaan sarana/prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan agar tercapai suatu sistem transportasi antar moda yang erat kaitannya dengan kondisi fisik dan geografi wilayah, mampu meningkatkan efektifitas transportasi antara daerah dan kawasan pertumbuhan serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat yang meliputi Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara serta sarana pendukung lainnya adalah sebagai berikut :

1. Angkutan Jalan Raya;

1.1. Prasarana Jalan

Prasarana jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan serta memiliki kontribusi terbesar dalam kegiatan koleksi dan distribusi barang maupun jasa dibandingkan moda lain.

Kinerja pelayanan jalan pada ruas jalan Provinsi pada umumnya cukup baik dengan rasio volume lalu-lintas per kapasitas rata-rata sebesar 0.4. Kemacetan lalu-lintas pada umumnya bersifat lokal dan temporer yang terjadi pada pusat-pusat kegiatan masyarakat (hari pasaran) dan upacara adat (nyongkol dan pawai adat lainnya).

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang umumnya diakibatkan oleh ketidak disiplinannya pengguna jalan, lemahnya pengawasan dari polisi lalu lintas, rendahnya tingkat kelaikan armada, serta rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan di jalan.

1.2. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Prasarana terminal penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Nusa Tenggara Barat sebanyak 22 terminal yang terdiri dari 3 (tiga) Terminal Tipe A, 6 (enam) Terminal Tipe B dan 13 (lima belas) Terminal Tipe C.

Tabel 2.3
Data Terminal per Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

No	Nama Terminal	Lokasi	Kabupaten/ Kota	Luas (m ²)	Tipe	Pengelola	Ket.
		(Desa/Kecamatan)					
1	Mandalika	Sandubaya No. 1 Bertais-Mataram / (0370)673869	Kota Mataram	3 Ha	A	Kementerian Perhubungan	Beroperasi
2	Sumer Payung	Jl. Garuda KM. 6, Kec. Labuan Badas	Sumbawa	25.090	A	Kementerian Perhubungan	Beroperasi
3	Dara	Kec. Rasanae Barat	Kota Bima	6.500	A	Kementerian Perhubungan	Beroperasi
1	Tanjung	Jl. Raya Tanjung	Lombok Utara	2.100	B	Dishub Provinsi	Beroperasi
2	Praya	Jl. Raya Renteng	Lombok Tengah	10.195	B	Dishub Provinsi	Beroperasi
3	Ginte	Ginte	Dompu	28.415	B	Dishub provinsi	Beroperasi
4	Tana Mira	Jl. Raya Lang Sesat, Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	2.752	B	Dishub Provinsi	Beroperasi
5	Pancor	Pancor	Lombok Timur	12.800	B	Dishub Provinsi	Beroperasi
6	Tente	Jl. Lintas Parado	Kab. Bima	1.000	B	Dishub Provinsi	Beroperasi
1	Lembar	Lembar	Lombok Barat	104	C	Dishub Kabupaten	Beroperasi
2	Narmada	Narmada	Lombok Barat	1.950	C	Dishub Kabupaten	Beroperasi
3	Keru	Keru	Lombok Barat	607	C	Dishub Kabupaten	Beroperasi
4	Gunung Sari	Gunung Sari	Lombok Barat	780	C	Dishub Kabupaten	Beroperasi
5	Kopang	Jl. Raya Kopang	Lombok Tengah	5.427	C	Dishub kabupaten	Beroperasi
6	Lb. Haji	Lb. Haji	Lombok Timur	2.043	C	Dishub Kabupaten	Beroperasi
7	Alas	Jl. Raya Alas-Tano, Kec. Alas	Sumbawa	1.689	C	Dishub Kabupaten	Beroperasi
8	Empang	Jl. Raya Sumbawa-Bima, Kec. Empang	Sumbawa	3.174	C	Dishub Kabupaten	Beroperasi
9	Kempo	Jl. Lintas Calabai, Ds. Soro, Kec. Kempo	Dompu	2.250	C	Dishub Kabupaten	
10	Sape	Jl. Pelabuhan Sape, Paji Desa Jia Kec. Sape	Kab. Bima	1.000	C	Dishub Kabupaten	Beroperasi
11	Kebon Roek	Jl. Adi Sucipto, Ampenan	Kota Mataram	2.500	C	Dishub Kota	Beroperasi
12	Jatibaru	Kec. Asakota	Kota Bima	4.500	C	Dishub Kota	Beroperasi
13	Kumbe	Kec. Rasanae Timur	Kota Bima	4.500	C	Dishub Kota	Beroperasi

1.3. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dibagi dalam 7 kelompok yaitu :

1. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan tempat asal maupun sebagai lintasan dari kota – kota di Jawa ke Jakarta atau sebaliknya.
2. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat di dalam Provinsi NTB (lintas kabupaten / kota).
3. Angkutan lokal baik berupa angkutan pedesaan maupun angkutan kota yang bergerak hanya dalam satu Kabupaten / kota saja.
4. Angkutan sewa, yang merupakan angkutan dengan pelayanan sampai ke alamat.
5. Angkutan sewa khusus yaitu angkutan yang sewa yang memanfaatkan teknologi informasi.

6. Angkutan Pariwisata merupakan angkutan khusus untuk melayani para wisatawan
7. Angkutan Taxi
8. Angkutan Masal Perkotaan/Bus Rapid Transit (BRT)

1.4. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

Kondisi prasarana transportasi yang sudah terbangun di Nusa Tenggara Barat terlihat pada gambardibawah ini.



Gambar 2. 2
Prasarana Transportasi di NTB

Meningkatnya jumlah penduduk provinsi akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat baik angkutan publik yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, dan menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan

publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Tabel 2.4
Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan	Unit	Seat
1	AKDP Lombok	207	3.789
2	AKDP Sumbawa dan Sumbawa Barat	127	2.176
3	AKDP Dompu	51	1.869
4	AKDP Bima	72	2.063

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2019

Untuk meningkatkan konektivitas selain dengan angkutan reguler Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis, baik angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Pada tahun 2019, angkutan darat memiliki 9 rute perintis yang dilayani oleh BUS DAMRI serta dua rute multimoda yaitu rute Lombok International Airport – Mataram - Senggigi dan rute Lombok International Airport – Pancor.

Tabel 2. 5
Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO.	RUTE	KETERANGAN
1.	Terminal mandalika – pancor PP	AKDP
2.	Terminal mandalika - labuhan Lombok PP	AKDP
3.	Terminal mandalika - masbagek - T.Lab. Lombok - sembalun PP	AKDP
4.	Terminal mandalika - taliwang PP	AKDP
5.	Terminal Mandalika - sumbawa besar PP	AKDP
6.	Terminal Mandalika - sumbawa besar - lunyuk PP	AKDP
7.	Terminal Mandalika - empang PP	AKDP
8.	Terminal Mandalika - praya - empang PP	AKDP
9.	Terminal Mandalika - dompu PP	AKDP
10.	Terminal Mandalika - bima PP	AKDP
11.	Lembar - T. Mandalika - lab. Lombok PP	AKDP
12.	Lembar - T. Mandalika - pancor PP	AKDP
13.	Subawa besar - ginte dompu - bima PP	AKDP
14.	Calabai - cabang soriotu - praya - T. Mandalika PP	AKDP

NO.	RUTE	KETERANGAN
15.	Calabai - cabang soriutu - t. Mandalika PP	AKDP
16.	Bima - ginte dompu - kore PP	AKDP
17.	Bima - telabiu - ginte dompu PP	AKDP
18.	Sape - bima - ginte dompu PP	AKDP
19.	Bima - ginte dompu - lab. Kenanga PP	AKDP
20.	Bima - ginte dompu - kilo PP	AKDP
21.	Tente - ginte dompu - kore - bima PP	AKDP
22.	Tonggo - Jereweh - taliwang - Praya - T. Mandalika PP	AKDP
23.	Taliwang - alas - sumbawa besar PP	AKDP
24.	Bima - dompu - hu'u PP	AKDP
25.	Sembalun - t. Mandalika PP	AKDP
26.	Pelampang - sumbawa besar - utan - t. Mandalika PP	AKDP
27.	T. Mandalika - t. Labuhan lombok - sembalun PP	AKDP
28.	Pelampang - sumbawa - t. Mandalika PP	AKDP
29.	T. Mandalika -tanjung - bayan PP	AKDP
30.	Pelampang - sumbawa - praya - t. Mandalika PP	AKDP
31.	T. Mandalika - praya - kopang - sumbawa PP	AKDP
32.	Empang - sumbawa - mataram PP	AKDP
33.	Empang - lape - sumbawa - praya - t. Mandalika PP	AKDP
34.	Empang - pelampang - t. Mandalika PP	AKDP
35.	Kempo - dompu - bima PP	AKDP
36.	Kesi - dompu - bima PP	AKDP
37.	T. Labuhan lombok - masbagek - t. Mandalika PP	AKDP
38.	LunyuK - sumbawa - praya - t. Mandalika PP	AKDP
39.	Sumbawa - maluk PP	AKDP
40.	Sekongkang - maluk - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP	AKDP
41.	Sekongkang - taliwang - t. Mandalika PP	AKDP
42.	Sekongkang - taliwang - pototano - alas PP	AKDP
43.	Sekongkang - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP	AKDP
44.	Sekongkang - taliwang - sumbawa besar PP	AKDP
45.	Sumbawa - tano - taliwang - maluk PP	AKDP
46.	Tonggo - jereweh - taliwang - pototano - alas - sumbawa PP	AKDP
47.	Tonggo - taliwang - pototano - sumbawa PP	AKDP
48.	Tonggo - taliwang - sumbawa PP	AKDP
49.	Santong - tanjung - gunungsari - T. Mandalika PP	AKDP
50.	Sumbawa besar - alas - tano - taliwang PP	AKDP
51.	Dompu - sumbawa - mataram PP	AKDP
52.	Bayan - tanjung - gunungsari - T. Mandalika PP	AKDP
53.	Bayan - tanjung - T Mandalika PP	AKDP
54.	Bima - dompu - t. Mandalika PP	AKDP
55.	Bima - dompu - calabai - lb. Kenanga PP	AKDP
56.	Sembelia - lb. Lombok - t. Mandalika PP	AKDP
57.	Sembelia - kayangan - t. Mandalika - lembar PP	AKDP

NO.	RUTE	KETERANGAN
58.	Sembelia - t. Mandalika PP	AKDP
59.	Bima - dompu - lb. Kananga (melalui kempo - doropeti - calabai) PP	AKDP
60.	Bima - dompu - sumbawa besar PP	AKDP
61.	Calabai - dompu - sumbawa besar - praya - T. Mandalika PP	AKDP
62.	Calabai - dompu - bima PP	AKDP
63.	Calabai - manggalewa - praya - t. Mandalika PP	AKDP
64.	Sumbawa - utan - T. Mandalika PP	AKDP
65.	Sumbawa - alas - pototano - taliwang - sekotong PP	AKDP
66.	Taliwang - maluk - sekongkang - t. Mandalika PP	AKDP
67.	Taliwang - sumbawa besar PP	AKDP
68.	Taliwang - seteluk - pototano - utan - sumbawa PP	AKDP
69.	Tanjung - gunungsari - t. Mandalika PP	AKDP
70.	Tente - dompu - calabai PP	AKDP
71.	Tente - dompu - sumbawa besar PP	AKDP
72.	Tonggo - sekongkang - maluk - jereweh - taliwang - pototano - sumbawa besar PP	AKDP
73.	Sape - bima - sumbawa PP	AKDP
74.	T. Mandalika - taliwang - jereweh - maluk - tonggo PP	AKDP
75.	T. Mandalika - taliwang - maluk - tonggo PP	AKDP
76.	Sumbawa - alas - pototano - taliwang PP	AKDP
77.	Alas - pototano - taliwang - maluk - sekongkang PP	AKDP
78.	Bima - dompu PP	AKDP
79.	Bima - sumbawa besar PP	AKDP
80.	Bima - tente - dompu - hu'u PP	AKDP
81.	Calabai - bima - dompu PP	AKDP
82.	Jereweh - taliwang - pototano - T. Labuhan lombok - t. Mandalika PP	AKDP
83.	Labangka - sumbawa - utan - rhe -T. Mandalika PP	AKDP
84.	Labangka - sumbawa - utan - rhe - T. Mandalika PP	AKDP
85.	Maluk - taliwang - T. Mandalika PP	AKDP
86.	Maluk - taliwang - pototano - alas - sumbawa besar PP	AKDP
87.	Mataram -jereweh - maluk - sekongkang - tonggo PP	AKDP
88.	Mataram - praya - labangka PP	AKDP
89.	Mataram - sumbawa besar - dompu PP	AKDP
90.	Mataram - pelampang - labangka PP	AKDP
91.	Mataram - bangkobangko PP	AKDP Perintis
92.	Mataram - labangka PP	AKDP
93.	Mataram - leweng PP	AKDP
94.	Mataram - lunyuk PP	AKDP
95.	Mataram - mata PP	AKDP Perintis
96.	Mataram - moyo PP	AKDP Perintis
97.	Mataram - pesugulan PP	AKDP Perintis
98.	Mataram - praya - sumbawa besar - labangka PP	AKDP

NO.	RUTE	KETERANGAN
99	Mataram - sampar goal PP	AKDP
100	Mataram - santong PP	AKDP Perintis
101	Mataram - sumbawa besar - ropang PP	AKDP Perintis
102	Mataram - talonang PP	AKDP Perintis
103	Mataram - praya - awang melalui ganti PP	AKDP Perintis
104	Mataram - sumbawa - lendanggoar - orong telu PP	AKDP Perintis
105	Pelabuhan lembar - t. Mandalika PP	AKDP
106	Sumbawa - sampar goal PP	AKDP
107	Lombok international airport - mataram-senggigi PP	Multimoda *
108	Bangsals - mataram - kek mandalika PP	Multimoda *
109	Kayangan - labuhan haji - keruak - kek mandalika PP	Multimoda *
110	Lembar/gili mas - mawun - kek mandalika PP	Multimoda *
111	Bandara sultan salahudin - ginte dompu PP	Multimoda *
112	Mandalika - kayangan PP	Multimoda *
113	Bangsals - sembalun PP	Multimoda *
114	Mandalika - lembar PP	Multimoda *
115	Bus Rapid Transit (BRT) Kota Mataram	Damri *
116	Bus Rapid Transit (BRT) Sumbawa Besar	Damri *
117	Bus Disabilitas Kota Mataram	Damri *
118	Bus Disabilitas Kota Bima	Damri *
119	Bus Disabilitas Kabupaten Lombok Tengah	Damri *
120	Bus Disabilitas Kabupaten Lombok Timur	Damri *

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2020

Selain membuka konektivitas antar wilayah, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB
Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Meninggal Dunia (Jiwa)
1	2015	2.601	519
2	2016	2.820	536
3	2017	1.463	473
4	2018	1.673	562
5	2019	1.813	526

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2019



Dari data diatas terlihat bahwa jumlah kejadian kecelakaan menurun dari 2.601 kejadian pada tahun 2015 menjadi 1.813 kejadian pada tahun 2019. Korban yang meninggal dunia cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2015 terdapat 519 korban meninggal dunia dan menurun pada 3 tahun dan pada tahun 2019 menjadi 526 orang. Salah satu eksek negatif dari konektivitas transportasi adalah terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi, untuk itu dibuat sebuah Rasio Fatalitas untuk mengukur keberhasilan penanganan lalu lintas dengan menghitung jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dibanding dengan 1/10.000 jumlah seluruh kendaraan yang ada.

Tabel 2.7
Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rasio Fatalitas
1	2015	1.266.198	519	4,10
2	2016	1.360.759	536	3,94
3	2017	1.448.996	473	3,26
4	2018	1.646.647	562	3,41
5	2019	1.561.454	526	3,37

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2019

2. Angkutan Penyeberangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 4 (empat) Pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Pototano dan Pelabuhan Sape, dengan lintas penyeberangan Lemba–Padangbai, Kayangan–Pototano, Sape–Labuhan Bajo dan Sape–Waikelo yang masing-masing lintasan dilayani oleh kapal ferry yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (pesero).

a. Transportasi Laut

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat sistem jaringan pelayanan transportasi laut berupa pelabuhan, dan mengacu Kemenhub No. KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), dimana terdapat 5 (lima)

Pelabuhan Pengumpul, 3 (tiga) Pelabuhan Regional dan 17 (tujuh belas) Pelabuhan Lokal yang berada di Provinsi NTB, yaitu sebagai berikut :

a.1. Pelabuhan Pengumpul

Berfungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan barang nasional, mampu menangani semi kontainer dengan volume kegiatan bongkar muat

1. Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
2. Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa;
3. Pelabuhan Bima di Kota Bima.
4. Pelabuhan Labuan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
5. Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;

a.2. Pelabuhan Pengumpan Regional

Berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar Kab/Kota, yang termasuk Pelabuhan Regional antara lain :

1. Pelabuhan Pemenang/Tanjung di Kabupaten Lombok Utara,;
2. Pelabuhan Calabai di Kabupaten Dompu;
3. Pelabuhan Sape (Angkutan Laut dan Angkutan Penyeberangan) di Kabupaten Bima.

a.3. Pelabuhan Lokal :

Berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kab/Kota, yang termasuk Pelabuhan Lokal antara lain:

1. Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu;
2. Pelabuhan Ampenan (tersus) di Kota Mataram;
3. Pelabuhan Labuan Haji di Lombok timur;
4. Pelabuhan Alas di Sumbawa;
5. Pelabuhan Jeranjang (tersus) di Lombok Barat;
6. Pelabuhan Senggigi di Kabupaten Lombok Barat;
7. Pelabuhan Teluk Awang (perikanan) di Lombok Barat;
8. Pelabuhan Tawun di Lombok Barat;
9. Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur;

10. Pelabuhan Telong-elong di Lombok Timur;
11. Pelabuhan Kayangan (ASDP) di Lombok Utara;
12. Pelabuhan Kartasari (tersus) di Sumbawa;
13. Pelabuhan Jambu (pelra) di Sumbawa;
14. Pelabuhan Pulau Moyo di Sumbawa;
15. Pelabuhan Labuan Lalar di Kabupaten Sumbawa;
16. Pelabuhan Pototano (ASDP) di Kabupaten Sumbawa Barat.
17. Pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima

Konektivitas Angkutan laut bertujuan untuk membuat hubungan antara NTB dan provinsi lainnya lebih terakses baik untuk mobilitas barang atau mobilitas orang. Selain itu konektivitas angkutan laut juga diperlukan untuk menghubungkan antar wilayah dalam NTB terutama menuju pulau-pulau kecil, kawasan wisata dan kawasan yang berpotensi tumbuh. Pada tahun 2019 beberapa rute baru telah dibuka menggunakan angkutan perintis yang berpangkalan di Pelabuhan Bima untuk menghubungkan NTB dengan daerah-daerah terpencil di NTT, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Khusus untuk angkutan barang pada akhir tahun 2019 diinisiasi pembukaan rute baru angkutan Long Distance Ferry dari Surabaya, Jawa Timur – Badas, Sumbawa.

Tabel 2. 8
Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

No	Rute		Keterangan
1	Lembar	Bali (Padangbai)	Ferry
2		Surabaya	Legundi/Pelni
3		Bima/Makassar	Pelni
4		Banyuwangi/Probolinggo	*Ferry
5		Waingapu	Pelni
6	Pemenang/ Bangsal	3 Gili (Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan)	Kapal Cepat/Pelra
7		Bali (Padangbai, Benoa)	Kapal Cepat
8	Senggigi	3 Gili/Pemenang	Kapal Cepat/Pelra
9		Bali (Padangbai, Benoa)	Kapal Cepat
10	Kayangan	Pototano	Ferry
11		Benete	Kapal Cepat
12		Kenawa + Sekitarnya	*Roro/Kapal Cepat/

No	Rute	Keterangan
		Pelra
13	Calabai	*Kapal Cepat
14	Calabai	*Roro
15	Badas/Ai Bari Surabaya	*Roro besar
16	Moyo - Medang - Sibotok	*Kapal Rede/ Pelra
17	Labuhan Bajo/Makassar	Pelni
18	Bima NTT-Bali-Surabaya	Perintis/ Pelni
19	Lombok-Bali-Surabaya	*Perintis/ Pelni
20	Dompu - Lombok - Makassar	*Perintis/ Pelni
21	Telong-Elong Pink + Sekitar	*Speed Boat/Pelra
22	Benete/ Lalar	*Kapal Cepat/Pelra
23	Sape Waikelo	Ferry
24	Labuhan Bajo	Ferry
25	Pulau-Pulau Kecil di Kab. Bima	*Pelra
26	Labuhan Haji Labuhan Lalar	*Kapal Rede

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2019

b. Transportasi Udara

Transportasi udara sebagai salah satu simpul jasa distribusi angkutan udara yang mendukung arus perdagangan dan wisata merupakan penunjang bagi kebijakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana terdapat 3 (tiga) Bandara, 1 (satu) Bandara dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Angkasa Pura I (Persero) yaitu : Lombok Internasional Airport (LIA) di Penujak, Kabupaten Lombok Tengah dan Dua Bandara lainnya yaitu Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa dan Bandara M. Salahuddin Bima di Kabupaten Bima, merupakan bandara domestik yang dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Disamping itu terdapat 1 (satu) bandara khusus berupa "air strip" di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat yang dioperasikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT).

- Lombok Internasional Airport

Lombok Internasional Airport (LIA) terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Penujak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dibangun diatas lahan seluas 551 Ha. LIA merupakan bandara internasional dengan luas lahan terbesar ketiga di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Juanda di Surabaya.

- Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa
Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa berfungsi sebagai pusat penyebrangan tersier dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara terletak di Desa Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima
Bandar Udara M. Salahudin Bima berfungsi sebagai pusat penyebrangan tersier dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara, terletak di Desa Belo Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima.

Tabel 2. 9
Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

No	Rute	Ket.	
1	Bandara International Zainudin Abdul Majid (BIZAM)	Benete	
2		Sumbawa	
3		Bima	
4		Denpasar	
5		Surabaya	
6		Semarang	
7		Solo	*
8		Yogyakarta	
9		Bandung	*
10		Jakarta	
11		Banjarmasin	*
12		Makassar	
13		Labuan Bajo	*
14		Kualalumpur	
15		Singapura	*
16		Australia (Pert)	*
17		China	*
18		Vietnam	*
19		Jeddah/Arab Saudi	
20	Bandara Sultan Kaharuddin	BIZAM	
21		Denpasar	*
22		Surabaya	*
23	Bandara Sultan Salahuddin	BIZAM	
24		Denpasar	
25		Makassar	
26		Labuhan Bajo	
27		Surabaya	*

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2019



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015 - 2019

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan selama 5 tahun periode tahun 2015-2019 berdasarkan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tabel 2.10 dibawah ini:

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2015 – 2019
Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tersedianya peranko, material dan pengiriman surat-surat dinas selama 60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	2,000 surat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	3,344 surat	1.00	1.00	1.00	1.00	1.67
2	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik			Terbayarnya rekening air, telpon, listrik dan internet dinas selama 60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	264 Jenis	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	264 Jenis	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Terselenggaranya Perbaikan dan Peralatan Kerja			Perbaikan Peralatan kerja sebanyak 270 unit	55 unit				5 Jenis	55 unit				4 Jenis	1.00	0,00	0,00	0,00	0,80
4	Jumlah Kendaraan yang Terkena Pajak			Pajak Kendaraan dinas operasional R2 dan R4	-	-			16 Unit	-	-			16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5	Jumlah Pegawai Administrasi Keuangan yang dibayar			Terbayarnya Honor Pengelola Administrasi Keuangan sebanyak 9 orang selama 60 bulan	180 OB	168 OB	12 orang	12 orang	108 orang/bulan	180 OB	168 OB	12 orang	12 orang	108 orang/bulan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Terbayarnya Honor Cleaning Service sebanyak 78 orang	13 orang	13 orang	18 orang	18 orang	432 orang/bulan	13 orang	13 orang	18 orang	18 orang	432 orang/bulan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor selama 60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	43 Jenis	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	43 Jenis	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Cetakan dan Penggandaan kantor selama 60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	9 Jenis	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	9 Jenis	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Terselenggaranya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan			Alat-alat listrik selama 60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 Jenis	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	9 Jenis	1.00	1.00	1.00	1.00	0,75
10	Tersedianya Printer, Komputer PC dan Laptop			Printer, komputer dan Laptop sebanyak 22 unit	13 unit	46 unit	29 unit	27 Jenis	27 Jenis	13 unit	46 unit	29 unit		27 Jenis	1.00	1.00	1.00	0,00	1,00
11	Tersedianya bahan bacaan di Dishubkominfo Prov. NTB			Langganan koran sebanyak 100 eksemplar	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	36 Eksemplar	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	26 Eksemplar	1.00	1.00	1.00	1.00	0,72
12	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu selama 150 kali	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	2,477 Orang/kali	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	2,085 Orang/kali	1.00	1.00	1.00	1.00	0,84
13	Tersedianya dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta/Provinsi Lainnya selama 60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	43 OT	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	63 OT	1.00	1.00	1.00	1.00	1,47
14	Jumlah PTT yang dibayar			Honor PTT sebanyak 3 orang selama 60 bulan	36 OB	42 OB	3 orang	3 orang	42 OB	36 OB	42 OB	3 orang	3 orang	42 OB	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			Perjalanan dinas dalam daerah ke Kab/Kota se NTB selama 60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	108 OT	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	117 OT	1.00	1.00	1.00	1.00	1,08
16	Meningkatnya keamanan kantor			Petugas keamanan 11 orang					72 OB					72 OB	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17	Terbangunnya gedung Kantor			Gedung Kantor 1 unit	1 unit	-				1 unit					1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional			Kendaraan Dinas Operasional 2 unit		2 unit	2 unit				2 unit	2 unit			0,00	1.00	1.00	0,00	0,00
19	Tersedianya Sarana Prasarana Mebeleur			Meja kerja, kursi, meja komputer				2 unit	3 Jenis					3 Jenis	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			Komputer PC 2 unit dan printer 3 unit					2 Jenis					2 Jenis	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor			Pemeliharaan Gedung 3 unit	1 paket	1 paket	1 Unt			1 paket	1 paket				1.00	1.00	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Service Kendaraan dinas sebanyak 360 unit selama 60 bulan, BBM kendaraan dinas selama 60 bulan	72 unit	47 unit	29 unit	47 unit	21 Unit	72 unit	47 unit			21 Unit	1.00	1.00	0,00	0,00	1,00
23	Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja			service AC, Komputer, printer dan LCD		60 unit	50 unit	50 unit	12 Jenis		60 unit			12 Jenis	0,00	1.00	0,00	0,00	1,00
24	Terbangunnya Gedung				-	-					-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat			Diklat bidang Perhubungan dan diklat teknis lainnya sebanyak 50 orang	10 orang	5 orang	11 orang	0		10 orang	4 orang				1.00	0,80	0,00	0,00	0,00



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
26	Terselenggaranya Pemeliharaan Mental dan Fisik Aparatur			Imtaq dan Senam sebanyak 250 kali	20 kali	20 kali	20 kali	38 kali	302 Orang/ jam	20 kali	20 kali				213 Orang/ jam	1.00	1.00	0.00	0.00	0.71
27	Jumlah Dokumen Lkip dan Laporan Tahunan			Dokumen Lkip dan Laporan Tahunan sebanyak 50 dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	3 dok	2 Dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	3 dok	2 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
28	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid			Jumlah Dokumen laporan keuangan					1 Dokumen					1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00	
29	Tersedianya Rencana Kerja SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPPA dan Rencana Tahunan)			Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA dan Rencana Kerja sebanyak 75 dokumen	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	4 Dokumen	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	4 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
30	Tersedianya tanah untuk jembatan timbang														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Terbayarnya honorarium pengelola barang milik daerah			Honor Pengurus Barang Dinas selama 60 bulan	12 bln					12 bln					1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Terpasangnya papan nama untuk Asset			Papan Nama Asset sebanyak 20 buah	10 buah					10 buah					1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Tersedianya tanah untuk jembatan timbang, Terbayarnya honor pengurus barang dan penyimpanan barang, Tersusunnya dokumen asset dinas			Jumlah dokumen data asset		1 dok	1 dok	1 dok	1 Dokumen		1 dok	1 dok	1 dok	1 Dokumen	0,00	1.00	1.00	1.00	1.00	
34	Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi Berupa Usulan Program/ kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo			Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1.00	1.00	1.00	1.00	0,00	
35	Tersedianya Rencana Pembangunan Prasarana Perhubungan			dokumen prasana perhubungan sebanyak 12 dokumen				0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Tersedianya Rencana Pembangunan Prasarana Perhubungan			Tersedianya dokumen laporan koordinasi di sektor Hubkominfo sebanyak 1 dokumen		1 Dokumen					1 Dokumen				0,00	1.00	0,00	0,00	0,00	
37	Tersedianya Rencana Pembangunan Prasarana Perhubungan			Database Perengkapan Jalan Berbasis WebGIS, 1 Paket		1 Paket					1 Paket				0,00	1.00	0,00	0,00	0,00	
38	Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan					2 Dokumen					2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00	
39	Terlaksananya koordinasi dan sinergi dengan kab/kota			Tersedianya dokumen laporan rapat koordinasi di sektor Perhubungan			1 dokumen				1 dokumen				0,00	0,00	1.00	0,00	0,00	
40	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan, Renstra Perhubungan Kominfo Provinsi NTB dan Penyusunan Tatrawil			dokumen SPM, dokumen Renstra dan dokumen Tatrawil sebanyak 3 dokumen											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Jumlah Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB			Dokumen RENSTRA											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Terlaksananya Penyusunan Pergub Andalalin, Naskah Akademik Perubahan Perda Provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Naskah Akademik Raperda pengelolaan Terminal Tipe B di NTB dan Naskah Akademik Raperda Fasilitas Keselamatan Transportasi			Terlaksananya Penyusunan Pergub Andalalin, Naskah Akademik Perubahan Perda Provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Naskah Akademik Raperda pengelolaan Terminal Tipe B di NTB dan Naskah Akademik Raperda Fasilitas Keselamatan Transportasi			4 dokumen				4 dokumen				0,00	0,00	1.00	0,00	0,00	
43	Penyusunan Pergub Andalalin, Naskah Akademik Raperda penyelenggaraan Terminal Tipe B, Naskah Akademik Raperda Fasilitas Keselamatan transportasi			dokumen Pergub Andalalin, Naskah Akademik Raperda penyelenggaraan Terminal Tipe B, Naskah Akademik Raperda Fasilitas Keselamatan transportasi	0 0	0 0	3 Dokumen	2 Dokumen			3 Dokumen	2 Dokumen			0,00	0,00	1.00	1.00	0,00	
44	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan, Pergub Andalalin, Revisi Perda 6 thn 2013 ttg penyelenggaraan perhubungan			Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan, Pergub Andalalin, Revisi Perda 6 thn 2013 ttg penyelenggaraan perhubungan			1 Dok	3 dokumen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi berupa usulan program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo			dokumen hasil Rakornis bidang perhubungan se NTB sebanyak 1 dokumen	1 dok										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke									
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
46	Dokumen Perda Tentang Penyelenggaraan Kominfo dan Pergub Tatrawil Tersosialisasi			Dokumen Perda Tentang Penyelenggaraan Kominfo dan Pergub Tatrawil Tersosialisasi											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
47	Pengerasan Jalan Masuk Jembatan Pototano			Pengaspalan jalan masuk ke jembatan timbang seluas 848,25 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
48	Pembuatan Sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Jembatan Timbang Bertais			Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jembatan Timbang Bertais, 1 set	1	Set				1	Aplikasi				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
49	Pemasangan CCTV di Jembatan Timbang Bertais			Pemasangan CCTV di Jembatan Timbang Bertais											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
50	Honorarium Operasional Jembatan Timbang			Honor Pengawasan dan Pengendalian di Jembatan Timbang, 272 hari											0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
51	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang			Penyediaan genseet											0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
52	Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo se NTB			Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo se NTB	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					
53	Kajian Pengembangan Terminal Tipe B (Ginte dan Renteng)			dokumen DED Terminal Ginte dan Terminal Renteng			2	Dokumen		1	Dokumen			2	Dokumen			1	Dokumen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
54	Dokumen laporan hasil kajian pengembangan pengelolaan terminal Type B dan dokumen perencanaan pengembang terminal			Dokumen laporan hasil kajian pengembangan pengelolaan terminal Type B dan dokumen perencanaan pengembang terminal					2	dokumen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
55	Perencanaan Peningkatan/ Pengembangan Terminal			Perencanaan Peningkatan/ Pengembangan Terminal					1	Dokumen				1	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00				
56	Terpeliharanya Jembatan Timbang di Bertais dan Pototano			Sistem Komputerisasi Jembatan Timbang Bertais dan Peraltan Jembatan Timbang Pototano yang diperbaiki					0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
57	Rehab Atap Gedung Jembatan Timbang Bertais			Rehab Atap Gedung Jembatan Timbang Bertais	1	Gedung								1	Gedung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
58	Rehab Musholla Jembatan Timbang Bertais			Rehab Musholla Jembatan Timbang Bertais	1	Gedung								1	Gedung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
59	Terpasangnya pagar pelabuhan telong elong			Pemagaran Pelabuhan Telong-Elong, 260 m			260	m	0				260	m	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
60	Jumlah Fasilitas terminal tipe B yang terpelihara			Rehab toilet terminal ginte kab dompu						1	paket							1	paket					
61	Terpeliharanya Traffic Light			Jumlah Fasilitas Keselamatan LAJ yang dipelihara	15	Unit	20	Unit	0						1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
62	Traffic Light			Traffic Light	15	Unit									1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
63	PJU dan Warning Light			PJU dan Warning Light			20	Unit							0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
64	Terlaksananya Pemeriksaan Kelainan Angkutan Umum di jalan dan Pengawasan Pemeriksaan Kelainan Angkutan Barang dan Angkutan Penumpang di Seluruh Kab./Kota	SOP Perpanjangan SK pengawasan jin operasi (RPS) landasan hukum: UU no 22 tahun 2009 PP74 tahun 2014 KM 35 tahun 2003 perda no 6 tahun 2013		Kelainan angkutan barang dan angkutan umum / penumpang di seluruh Kab/Kota P. Sumbawa	5	Kab/Kota	10	Kab/Kota							1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan			Jumlah Kendaraan Angkutan, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat kelengkapan laik jalan)	975	Unit	975	Unit							1,35	1,35	0,00	0,00	0,00					
66	Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan Berhulu Lintas			Jumlah Orang Yang Tersosialisasi	100	Orang	100	Orang							1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
90	Jumlah Peserta Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB			Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan			1680 Orang	1680 Orang				1680 Orang	1680 Orang		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
91	Terlaksananya rapat koordinasi FLIA, Sosialisasi FLIA, Audit Keselamatan Jalan			Terlaksananya rapat koordinasi FLIA, Sosialisasi FLIA, Audit Keselamatan Jalan					1251 Orang					500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
92	Terlaksananya pengawasan dan penertiban perijinan angkutan			Terlaksananya pengawasan dan penertiban perijinan angkutan		10 Kab/Kota	10 Kab/Kota				10 Kab/Kota	10 Kab/Kota			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
93	Jumlah kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelakuan jalan)			Jumlah kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelakuan jalan)		975 unit	700 unit	1494 unit			975 unit	700 unit	1494 unit		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
94	Terlaksananya Survey Load Faktor Trayek AKDP			Tersedianya dokumen Load Faktor Jaringan Trayek AKDP			1 dokumen					1 dokumen			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
95	Terlaksananya penataan jaringan trayek			Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Penataan Jaringan Trayek AKDP di NTB						1 Dokumen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Terlaksananya koordinasi pelayanan angkutan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Tersedianya dokumen koordinasi pelayanan angkutan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			2 dokumen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum			2 Kegiatan					1 Kegiatan			0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
98	Koordinasi pelayanan angkutan perkotaan BRT, dokumen pelaksanaan monitoring BRT			Koordinasi pelayanan angkutan perkotaan BRT, dokumen pelaksanaan monitoring BRT				1 dokumen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Terlaksananya Operasional BRT			Terlaksananya Operasional BRT				1 Rute					1 Rute		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
100	Terlaksananya pembangunan halte portable angkutan umum massal (BRT)			Halte Angkutan Umum yang dibangun	1 Unit	18 Unit				1 Unit	8 Unit				1,00	0,44	0,00	0,00	0,00
101	Terlaksananya pengadaan tangga halte untuk angkutan umum massal (BRT)			Tangga Halte			70 buah					70 buah			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
102	Terlaksananya Pengadaan Rambu Bus Stop			Rambu Bus Stop			140 buah					140 buah			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
103	Lanjutan Pembangunan Gedung terminal Haji/TKI BIL : - Pembangunan Musholla dan Gudang - Fasilitas Pendukung Terminal Haji/TKI BIL (Jalan Akses, Lapangan Parkir, Pagar, dan Landseping)			Lanjutan Pembangunan Gedung terminal Haji/TKI BIL : - Pembangunan Musholla dan Gudang - Fasilitas Pendukung Terminal Haji/TKI BIL (Jalan Akses, Lapangan Parkir, Pagar, dan Landseping)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Tersedianya fasilitas penunjang perhubungan udara			Tersedianya Gedung Terminal Haji/TKI			1 gedung					1 gedung			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
105	Terpasangnya rambu lalu lintas dan RPPJ			Jumlah Rambu Rambu Lalu Lintas Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	220 Buah	105 Buah				220 Buah	105 Buah				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
106	Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa			Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	66 Buah	20 Buah				66 Buah	20 Buah				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
107	Terpasangnya Marka Jalan			Panjang Marka Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi di Kota Mataram	526 m2					220 m2					0.42	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Terpasangnya pagar pengaman jalan			Panjang Pagar Pengaman Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	220 m					220 m					1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Terpasangnya traffic light			Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di Pulau Sumbawa, 1 unit		1 Unit									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Terpasangnya Lampu Warning Light			Jumlah Warning Light Terpasang di Kota Mataram	5 Unit	5 Unit				5 Unit	5 Unit				1.00	1.00	0,00	0,00	0,00
111	Pengadaan Warning Light di Kab. Sumbawa			Pengadaan Warning Light di Kab. Sumbawa		1 Unit					1 Unit				0,00	1.00	0,00	0,00	0,00
112	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan di Kota Mataram dan Kab. Lombok Barat			Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan di Kota Mataram dan Kab. Lombok Barat			160 buah	7 jenis				160 buah			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
113	Pengadaan dan pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jurusan (RPP) di P. Lombok			Pengadaan dan pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jurusan (RPP) di P. Lombok			25 Buah	4 Buah				25 Buah	4 Buah		0,00	0,00	1.00	1.00	0,00
114	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Lombok Utara dan Lombok Barat			Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Lombok Utara dan Lombok Barat			100 m'					100 m'			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
115	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Lombok Timur			Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Lombok Timur			85 m'					85 m'			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
116	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Kab. Sumbawa			Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan di Kab. Sumbawa			70 m'					70 m'			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
117	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Kota Mataram dan KLU			Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Kota Mataram dan KLU			530 m2					530 m2			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
118	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Lombok Barat dan Lombok Timur			Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Lombok Barat dan Lombok Timur			450 m2					450 m2			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
119	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Sumbawa Barat			Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Sumbawa Barat			400 m2					400 m2			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
120	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di Lombok Tengah			Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light di Lombok Tengah			1 Paket					1 Paket			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
121	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Kota Mataram, Lombok Barat dan KLU			Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Kota Mataram, Lombok Barat dan KLU			5 unit					5 unit			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
122	Pengadaan dan pemasangan Rambu Petunjuk Pendahuluan Jurusan (RPP) Geosite Tambora			Pengadaan dan pemasangan Rambu Petunjuk Pendahuluan Jurusan (RPP) Geosite Tambora			24 buah					24 buah			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
123	Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan di Kota Mataram, KLU, Lobar, Lotim, dan Sumbawa			Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan di Kota Mataram, KLU, Lobar, Lotim, dan Sumbawa			1380 m2	475 m2				1380 m2	475 m2		0,00	0,00	1.00	1.00	0,00
124	Pemasangan Pagar pengaman Jalan (guard Rail) di KLU, Lobar, Lotim, dan Sumbawa			Pemasangan Pagar pengaman Jalan (guard Rail) di KLU, Lobar, Lotim, dan Sumbawa			225 m					225 m			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
125	Pengadaan dan pemasangan Traffic Light di Loteng 12 Unit			Pengadaan dan pemasangan Traffic Light di Loteng 12 Unit			1 Paket					1 Paket			0,00	0,00	1.00	0,00	0,00
126	Jumlah Terpasangnya fasilitas keselamatan			RPP Geosite Rinjani Lombok UGSp (APGN 2019)					1 jenis					1 jenis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00
127	Tersedianya data informasi tentang perlengkapan jalan di NTB			Survey Inventarisasi Perlengkapan Jalan			1 Dokumen	1 Dokumen	0			1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	1.00	1.00	0,00
128	Terdatanya fasilitas keselamatan jalan dan tersedianya aplikasi smart city BRT			Terdatanya fasilitas keselamatan jalan dan tersedianya aplikasi smart city BRT					2 dokumen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Jumlah Pemilihan pelajar pelopor keselamatan transportasi darat dan sosialisasi keterbiban lalu lintas dan angkutan			Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan transportasi darat			2 orang	20 orang							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
130	Tersosialisasinya peserta Sosialisasi/penyuluhan keterbitan lalu lintas dan angkutan			Tersosialisasinya peserta Sosialisasi/penyuluhan keterbitan lalu lintas dan angkutan			50 orang								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas			Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas			2 Orang	1 Orang				3 Orang	2 Orang		0,00	0,00	1,50	2,00	0,00
132	Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas dan pengusaha angkutan barang dan penumpang serta pemilihan Abdi Yasa Teladan			Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas dan pengusaha angkutan barang dan penumpang serta pemilihan Abdi Yasa Teladan									100 orang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Pengendalian dan Pengawasan Keterbitan Terminal			Pengendalian dan Pengawasan Keterbitan Terminal				4 Terminal					4 Terminal		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
134	Terwujudnya keselamatan dan keamanan penerbangan			Terpantainya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 Lokasi Bandara (BL, Bima, Sumbawa)	3 Lokasi	3 Lokasi				3 Lokasi	3 Lokasi				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
135	Tersedianya data fasilitas kebandarudaraan yang lengkap dan akurat			Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
136	Meningkatnya pengembangan angkutan udara di NTB			Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Angkutan Udara di 3 Kab. Lokasi Bandara (Loteng, Bima, Sumbawa)	90 Orang	90 Orang		3 lokasi		90 Orang	90 Orang				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
137	Jumlah Penumpang Angkutan Udara			Jumlah Penumpang Angkutan Udara	2,843,000 Orang	2,298,000 Orang	3,476,000 Orang	3,626,000 Orang		2,707,814 Orang	3,778,787 Orang	4,080,124 Orang	4,205,496 Orang		0,95	1,64	1,17	1,16	0,00
138	Beroperasinya Rute Penerbangan Baru Internasional dan Domestik di NTB			Beroperasinya Rute Penerbangan Baru Internasional dan Domestik di NTB	1 Rute	1 Rute				1 Rute	2 Rute				1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
139	Tersedianya dokumen Fasilitas Bandar Udara			Pendataan KKOP, FAL, dan Angkutan			1 dokumen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Pameran Keselamatan Transportasi Laut dan Lomba Kapal Sehat			Pameran Keselamatan Transportasi Laut dan Lomba Kapal Sehat	2 Kegiatan					2 Kegiatan					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Terpeliharanya lampu navigasi pelayaran dan terbayarnya petugas lampu menara			Terpasangnya Tiang Penyangga Lampu Navigasi											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Pembangunan Menara dan Lampu Suar (Tj. Kesi, P. Nisarate, dan Tj. Pasir)			Pembangunan Menara dan Lampu Suar (Tj. Kesi, P. Nisarate, dan Tj. Pasir)		3 Lokasi					3 Lokasi				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
143	Penerbitan dan Pengawasan Pengoperasian Kapal Cepat Bali-Lombok			Penerbitan dan Pengawasan Pengoperasian Kapal Cepat Bali-Lombok			1 Rute	2 Rute				1 Rute	2 Rute		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
144	Terlaksananya pengendalian dan monitoring arus lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran			Data Sarana dan Prasarana Kepelabuhan di NTB	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
145	Profil dan Database Kepelabuhan di NTB			Profil dan Database Kepelabuhan di NTB			1 Aplikasi		1 Dokumen			1 Aplikasi		1 Dokumen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
146	Terlaksananya pembinaan pengusaha angkutan laut			Jumlah Peserta Pembinaan/ Sosialisasi tentang Angkutan Laut di 4 Lokasi Pelabuhan Laut (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima)	120 Orang	180 Orang	180 Orang	200 Orang		120 Orang	180 Orang	180 Orang			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
147	Jumlah Penumpang Angkutan Laut			Jumlah Penumpang Angkutan Laut	153,594 Orang	174,025 Orang	197,828 Orang	227,502 Orang		801,433 Orang	1,071,173 Orang	1,327,229 Orang	950,088 Orang		5,22	6,16	6,71	4,18	0,00
148	Terlaksananya pembinaan dan penerbitan jasa titipan			Jumlah Perusahaan Jasa Titipan Tertiba	130 Orang	50 Orang				130 Orang	50 Orang				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
149	Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			Laporan Evaluasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun Anggaran 2015 - 2019 Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.769.005.850	1.766.596.250	2.181.549.380	2.342.686.800	2.341.675.900	1.486.963.044	1.637.039.519	1.808.041.105	2.140.637.291	2.103.313.559	0,84	0,93	0,83	0,91	0,90	0,31	0,38
Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	9.000.000	4.000.000	3.600.000	3.500.000	3.851.970	8.944.630	2.733.850	1.752.500	1.687.500	0,96	0,99	0,68	0,49	0,48	0,59	0,26
Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	354.000.000	310.000.000	335.635.300	409.154.400	259.650.000	294.227.720	214.924.289	134.508.605	270.872.541	231.488.052	0,83	0,69	0,40	0,66	0,89	0,09	0,33
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	27.500.000	-	-	-	-	14.505.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	15.300.000	-	-	-	-	10.798.853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	120.744.000	114.744.000	105.196.700	97.141.500	102.740.000	108.744.000	114.044.000	104.592.900	80.534.950	93.011.500	0,90	0,99	0,99	0,83	0,91	-0,20	-0,23
Penyediaan jasa kebersihan kantor	217.480.000	308.358.300	467.544.220	959.803.400	869.443.200	217.434.000	308.349.400	373.830.500	956.278.600	796.989.600	1,00	1,00	0,80	1,00	0,92	1,96	2,15
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50.000.000	-	-	-	-	49.600.000	-	-	-	-	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	55.000.000	56.302.800	54.548.000	59.863.900	49.985.550	54.954.500	46.394.600	48.548.200	37.888.600	1,00	1,00	0,82	0,89	0,63	0,12	-0,06
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.088.000	59.313.600	48.878.400	55.892.000	41.995.000	26.775.650	58.846.800	40.702.350	52.750.900	39.729.600	0,99	0,99	0,83	0,94	0,95	1,10	1,12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	18.383.200	7.000.000	161.278.000	10.210.000	9.994.000	18.308.000	5.965.000	160.319.200	4.874.000	1,00	1,00	0,85	0,99	0,48	22,02	25,79
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	310.299.000	175.519.400	248.814.000	-	100.770.800	168.735.000	172.619.400	242.890.000	-	94.776.800	0,54	0,98	0,98	0,00	0,94	-0,17	0,28
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	85.000.000	52.250.000	36.400.000	40.750.000	28.375.000	81.980.000	51.360.000	36.400.000	31.790.000	24.855.000	0,96	0,98	1,00	0,78	0,88	-0,65	-0,85
Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000	104.750.000	50.840.000	83.000.000	73.500.000	59.441.000	104.678.500	47.984.600	63.864.000	54.506.500	0,99	1,00	0,94	0,77	0,74	0,84	0,51
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	276.634.500	329.928.350	634.144.560	216.238.500	256.766.000	213.381.050	315.343.800	587.648.100	212.649.800	248.826.254	0,77	0,96	0,93	0,98	0,97	0,50	0,75
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	72.800.000	87.793.400	87.793.400	102.000.000	113.444.000	72.800.000	87.775.500	87.597.400	102.000.000	110.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,40	0,39
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	130.960.350	141.556.000	99.000.000	159.281.000	184.862.000	130.013.104	126.890.700	96.793.200	159.276.600	175.620.300	0,99	0,90	0,98	1,00	0,95	0,43	0,41
Penyediaan jasa keamanan kantor	-	-	-	-	193.756.000	-	-	-	-	163.156.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00



Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	781.935.000	1.691.106.000	459.900.000	588.351.900	332.570.700	762.040.585	1.647.900.205	417.908.235	555.768.425	203.942.657	0,97	0,97	0,91	0,94	0,61	0,61	0,59
Pembangunan gedung kantor	111.375.000	-	-	-	-	108.510.000	-	-	-	-	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	611.890.000	55.700.000	-	-	-	598.130.500	52.100.000	-	-	0,00	0,98	0,94	0,00	0,00	-1,16	-1,16
Pengadaan Mebeleur	-	-	-	200.700.000	9.270.000	-	-	-	200.562.000	9.270.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-0,24	-0,24
Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan Alat Alat Elektronik	-	-	-	-	21.752.000	-	-	-	-	21.603.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	441.100.000	328.310.000	215.700.000	-	-	439.280.000	327.644.000	214.650.000	-	-	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-0,34	-0,34
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	229.460.000	701.906.000	110.000.000	356.351.900	268.848.700.000	214.250.585	673.225.705	98.938.235	328.353.425	159.354.657	0,93	0,96	0,90	0,92	0,59	3,39	3,48
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	-	49.000.000	78.500.000	31.300.000	32.700.000.000	-	48.900.000	52.220.000	26.853.000	13.715.000	0,00	1,00	0,67	0,86	0,42	0,01	-0,54
Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.445.000	100.696.000	258.313.000	28.100.000	27.640.000	42.331.000	97.337.500	187.296.800	27.300.000	21.497.500	0,67	0,97	0,73	0,97	0,78	1,26	1,32
Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	10.000.000	210.613.000	-	-	28.886.000	10.000.000	139.596.800	-	-	0,58	1,00	0,66	0,00	0,00	4,22	2,59
Pembinaan mental dan fisik aparatur	13.445.000	90.696.000	47.700.000	28.100.000	27.640.000	13.445.000	87.337.500	47.700.000	27.300.000	21.497.500	1,00	0,96	1,00	0,97	0,78	4,86	4,56
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	102.186.800	106.551.800	98.608.800	165.500.000	157.549.300	102.130.100	106.381.800	97.500.450	159.210.700	155.093.300	1,00	1,00	0,99	0,96	0,98	0,63	0,58
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.258.800	42.408.800	42.408.800	61.800.000	45.693.800	42.258.800	42.248.800	42.048.550	61.414.700	45.623.800	1,00	1,00	0,99	0,99	1,00	0,40	0,39
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	21.693.000	-	-	-	-	20.623.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	59.928.000	64.143.000	56.200.000	103.700.000	90.162.500	59.871.300	64.133.000	55.451.900	97.796.000	88.846.500	1,00	1,00	0,99	0,94	0,99	0,76	0,68
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	20.600.000	45.770.300	35.370.300	99.200.000	35.278.000	15.000.000	35.094.000	25.529.200	99.095.300	34.143.000	0,73	0,77	0,72	1,00	0,97	2,64	3,78
Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	20.600.000	45.770.300	35.370.300	99.200.000	35.278.000	15.000.000	35.094.000	25.529.200	99.095.300	34.143.000	0,73	0,77	0,72	1,00	0,97	2,64	3,78



Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	843.988.250	567.614.600	651.197.367	430.353.600	983.085.000	706.951.000	548.102.100	620.716.143	391.103.400	925.139.600	0,84	0,97	0,95	0,91	0,94	-0,20	-0,12
Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		302.686.900	171.900.000	-	952.610.000		299.469.600	161.704.500		894.984.600	0,00	0,99	0,94	0,00	0,94	0,10	0,67
Penyusunan kebijakan; norma; standar dan prosedur bidang perhubungan	4.060.000	-	234.479.000	317.375.000	-	4.060.000		217.372.900	280.323.400		1,00	0,00	0,93	0,88	0,00	56,84	52,58
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	184.650.000	-	-	-	-	178.889.200					0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan		-	-	-	-						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang	602.580.000	208.788.000	-	-	-	472.538.800	194.135.000				0,78	0,93	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,84
Monitoring; evaluasi dan pelaporan	52.698.250	56.139.700	47.818.367	49.400.000	30.475.000	51.463.000	54.497.500	46.993.000	48.700.000	30.155.000	0,98	0,97	0,98	0,99	0,99	-0,15	-0,14
Perencanaan peningkatan/ pengembangan terminal			197.000.000	63.578.600	-			194.645.743	62.080.000		0,00	0,00	0,99	0,98	0,00	-0,17	-0,17
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	175.000.000	307.802.000	-	-	171.950.000	171.218.000	299.510.000	-	-	170.204.000	0,98	0,97	0,00	0,00	0,99	0,65	0,64
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang	100.000.000	-	-	-	-	97.650.000					0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	225.700.000	-	-	171.950.000		218.260.000			170.204.000	0,00	0,97	0,00	0,00	0,99	-1,06	-1,06
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	75.000.000	82.102.000	-	-	-	73.568.000	81.250.000				0,98	0,99	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	736.338.000	3.366.693.400	2.195.730.900	3.008.260.300	1.579.280.300	613.337.500	3.107.782.589	1.987.642.746	2.639.800.171	1.479.444.265	0,83	0,92	0,91	0,88	0,94	3,48	3,92
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana transportasi guna keselamatan penumpang	36.362.000	40.167.000	-	-	-	19.667.600	24.767.900				0,54	0,62	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,01
Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal				-	-						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembinaan ketertiban lalu lintas dan angkutan	57.670.000	120.081.800	233.013.600	114.692.000	116.740.000	46.158.000	89.093.200	213.072.400	110.717.200	106.754.100	0,80	0,74	0,91	0,97	0,91	1,52	1,83
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	94.518.000	-	-	-	-	87.635.200					0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	50.949.000	-		-	-	47.090.300					0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengamanan dan Pengendalian arus lalu lintas	110.865.000	383.290.600	348.964.800	118.970.600	237.905.000	110.724.500	369.724.600	346.876.306	116.505.000	227.989.894	1,00	0,96	0,99	0,98	0,96	1,96	1,85
Pemilihan Kota Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	87.712.000					79.310.100					0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	37.335.000	-	-	-		33.447.600					0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penataan Jaringan Trayek			-	-							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Survey Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Provinsi NTB	45.927.000		-	-		29.420.900					0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Form Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	215.000.000		-	-		159.883.300					0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan	0	2.764.868.000	1.269.916.000	2.568.738.000	909.006.800		2.571.306.889	1.165.751.335	2.257.856.521	854.750.471	0,00	0,93	0,92	0,88	0,94	0,32	0,23
Pengawasan dan Penertiban Perijinan Angkutan		58.286.000	215.060.000	40.000.000	47.852.500		52.890.000	206.916.600	36.920.000	45.357.500	0,00	0,91	0,96	0,92	0,95	1,92	2,15
Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan			128.776.500	165.859.700	267.776.000			55.026.105	117.801.450	244.592.300	0,00	0,00	0,43	0,71	0,91	0,44	1,41
Inventarisasi transportasi kendaraan bermotor umum				-							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengendalian/pengawasan SPM dan perijinan angkutan penyeberangan lintas kayangan-pototano				-							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	192.342.000	602.470.000	3.603.968.000	-	-	186.510.000	231.670.420	3.336.166.600	-	-	0,97	0,38	0,93	0,00	0,00	6,86	13,39
Prasarana Perhubungan Udara	-	-	3.000.000.000					2.753.927.000			0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Prasarana Perhubungan Darat	192.342.000	602.470.000	603.968.000	-		186.510.000	231.670.420	582.239.600			0,97	0,38	0,96	0,00	0,00	1,88	1,51
Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	1.432.290.000	932.578.000	2.851.398.900	1.444.330.800	425.913.800	1.340.368.800	904.958.000	2.722.210.389	1.375.708.676	414.988.500	0,94	0,97	0,95	0,95	0,97	1,04	1,01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	660.834.000	289.228.000	-	-		655.737.600	288.280.000				0,99	1,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	-0,81
Pengadaan Marka Jalan	187.182.400	-	-	-		187.141.200					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	397.450.000	-	-	-		311.390.000					0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Traffic Light		451.350.000	-	-			424.678.000				0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Warning Light	186.823.600	192.000.000	-	-		186.100.000	192.000.000				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	-0,22
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan			2.610.017.400	1.160.510.400	211.140.000			2.510.544.689	1.116.804.276	210.605.000	0,00	0,00	0,96	0,96	1,00	-0,76	-0,76
Penyusunan Informasi/Database fasilitas keselamatan Jalan			80.000.000	82.449.400				67.401.000	79.360.000		0,00	0,00	0,84	0,96	0,00	0,01	0,04
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas			161.381.500	93.201.000	82.110.000			144.264.700	75.519.900	76.111.100	0,00	0,00	0,89	0,81	0,93	-0,45	-0,47
Pengendalian dan pengawasan ketertiban terminal				108.170.000	132.663.800				104.024.500	128.272.400	0,00	0,00	0,00	0,96	0,97	0,06	0,06



Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	Tahun-1 (2015)	Tahun-2 (2016)	Tahun-3 (2017)	Tahun-4 (2018)	Tahun-5 (2019)	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Transportasi Udara	240.119.000	164.252.000	49.507.353	676.768.700	26.363.200	214.207.983	130.213.385	28.725.900	673.063.200	19.710.300	0,89	0,79	0,58	0,99	0,75	11,42	21,02
Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Penerbangan	72.913.000	52.038.200	-	-	-	60.607.637	47.220.260	-	-	-	0,83	0,91	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,47
Peningkatan/Pengembangan Kebandarudaraan se NTB	61.518.000	36.225.800	-	-	-	49.251.150	24.945.800	-	-	-	0,80	0,69	0,00	0,00	0,00	-0,66	-0,74
Peningkatan/Pengembangan Angkutan Udara se NTB	105.688.000	75.988.000	49.507.353	676.768.700	26.363.200	104.349.196	58.047.325	28.725.900	673.063.200	19.710.300	0,99	0,76	0,58	0,99	0,75	11,80	21,24
Program Pengembangan Transportasi Laut	405.200.000	638.649.000	667.311.200	296.805.100	3.885.381.020	293.306.021	605.975.575	631.543.111	285.613.600	3.352.951.789	0,72	0,95	0,95	0,96	0,86	3,09	3,25
Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Pelayaran	260.000.000	485.178.000	301.366.600	199.800.000	196.767.800	148.279.262	460.958.000	281.418.650	193.676.000	193.982.800	0,57	0,95	0,93	0,97	0,99	0,15	1,41
Peningkatan/Pengembangan Kepelabuhanan di NTB	50.000.000	50.524.500	238.111.600	45.000.000	62.091.400	49.846.759	47.289.825	232.505.136	42.522.800	57.540.560	1,00	0,94	0,98	0,94	0,93	3,01	3,14
Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	95.200.000	102.946.500	127.833.000	52.005.100	3.626.521.820	95.180.000	97.727.750	117.619.325	49.414.800	3.101.428.429	1,00	0,95	0,92	0,95	0,86	16,91	15,09
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	38.000.000	32.125.000	60.900.000	-	-	25.034.500	27.379.800	50.205.165	-	-	0,66	0,85	0,82	0,00	0,00	0,49	0,68
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	38.000.000	32.125.000	60.900.000	-	-	25.034.500	27.379.800	50.205.165	-	-	0,66	0,85	0,82	0,00	0,00	0,49	0,68
Pelatihan Smart Driving (<i>eco-driving</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan SDM Perhubungan	-	-	61.400.000	-	-	-	-	54.614.000	-	-	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Peningkatan kualitas SDM Transportasi Darat	-	-	61.400.000	-	-	-	-	54.614.000	-	-	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Manajemen Transportasi Darat	-	-	84.342.000	-	91.963.200	-	-	40.595.000	-	50.089.600	0,00	0,00	0,48	0,00	0,54	0,00	0,00
Evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas	-	-	84.342.000	-	54.780.000	-	-	40.595.000	-	27.450.000	0,00	0,00	0,48	0,00	0,50	-0,09	-0,08
Evaluasi sistem transportasi perkotaan	-	-	-	-	37.183.200	-	-	-	-	22.639.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
	6.800.449.900	10.322.904.350	13.259.497.200	9.080.357.200	10.058.650.420	5.959.398.533	9.379.344.893	12.008.694.844	8.347.300.762,57	8.930.518.070	0,88	0,91	0,91	0,92	0,89	0,51	0,57



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Tabel 2.12

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Tantangan	No	Peluang
1	Konektivitas transportasi publik yang masih rendah	1	<ul style="list-style-type: none"> a. NTB merupakan salah satu destinasi super prioritas KEK Mandalika mendukung event internasional Moto GP b. Terdapat angkutan perintis untuk darat dan laut dari pemerintah pusat c. Adanya kewenangan untuk membuka rute baru dalam wilayah provinsi
2	Kurangnya SDM Teknis Perhubungan	2	Pendidikan/pelatihan dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Perhubungan
3	Tingginya Tingkat Kecelakaan Transportasi	3	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan b. Tersedianya peraturan daerah tentang fasilitas keselamatan jalan c. Tersedia Laboratorium Pusat Rujukan Nasional Pembinaan Jalan Daerah
4	Kualitas sarana dan prasarana yang belum memadai	4	Perkembangan Teknologi Informasi di Bidang perhubungan
5	Persaingan dunia usaha angkutan umum dengan angkutan pribadi	5	Regulasi angkutan
6	Meningkatnya kemacetan lalu lintas	6	Pengembangan Transportasi Berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksebilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perhubungan dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan di masa lima tahun mendatang.



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu OPD memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi, maka ada beberapa hal permasalahan permasalahan pelayanan transportasi dan faktor faktor yang mempengaruhi sehingga perlu adanya identifikasi permasalahan yang didasarkan dari hasil analisa kondisi internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan perhubungan , adapun rincian identifikasi permasalahan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata darat dan pulau-pulau kecil belum terbangun	Masih terdapat daerah yang belum terlayani sarana transportasi darat secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan masal perkotaan belum optimal • Angkutan multimoda Belum optimal • Pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat menuju daerah wisata, kawasan strategis dan kawasan potensial Masih kurang optimal
		Operasional dan pengelolaan terminal penumpang tipe B Belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengoperasian terminal tipe B terkait asset Belum optimal • Rendahnya kondisi infrastruktur terminal tipe B • Tidak tersedia fasilitas bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus • Kurangnya SDM teknis di Bidang Pengelolaan Terminal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran terhadap AKDP yang tidak masuk ke terminal
		Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan laut regional dan pelabuhan penyebrangan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan sepenuhnya belum tersedia • Pengawasan terhadap angkutan penyebrangan belum optimal • Penyediaan fasilitas khusus bagi kaum difabel pada sarana dan prasarana pelabuhan laut dan pelabuhan penyebrangan belum optimal • SDM teknis perhubungan laut masih terbatas
2	Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya sebesar 105,17%, dari 889 kasus pada tahun 2014 menjadi 1.842 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 sebanyak 1.726	Tingginya pelanggaran lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan • Kurangnya PPNS Perhubungan yang berperan dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan barang serta kendaraan bermotor (pengawasan)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	kasus	Terbatasnya fasilitas perlengkapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan di ruas jalan provinsi serta ruas jalan selain untuk mendukung event Moto GP dan pariwisata belum optimal • Penyediaan fasilitas khusus bagi kaum difabel pada sarana dan prasarana angkutan jalan belum optimal • Infrastruktur jalur bersepeda belum optimal

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023 yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang". Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 di wujudkan melalui 6 (enam) Misi pembangunan. Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut serta dalam mendukung Misi Pertama yaitu NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Pencapaian misi pertama ini diwujudkan melalui strategi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu **"Mewujudkan Konektivitas Transportasi Publik Antar Wilayah"**.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG				
NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I.	Misi 1: NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur sektor unggulan serta konektivitas wilayah	Konektivitas dalam wilayah dan antar wilayah Masih kurang	1. Trayek angkutan darat belum seluruhnya terisi oleh pengusaha angkutan.	1. NTB merupakan salah satu destinasi super prioritas KEK Mandalika mendukung event internasional Moto GP
			2. Integrasi angkutan belum optimal	1. menguatkan integrasi infrastruktur untuk berbagai moda transportasi, baik darat, laut dan udara, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan integrasi layanan transportasi, meningkatkan investasi sektor swasta
		Pelayanan transportasi darat dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat menuju daerah wisata, kawasan strategis dan kawasan potensial belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana transportasi darat, operasional terminal type B dan jasa pelayanan transportasi masih kurang • Angkutan massal perkotaan dan angkutan multimoda yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya subsidi pemerintah pusat dalam mendukung event nasional dan internasional • Tingginya potensi destinasi wisata • Adanya forum LLAJ sebagai wadah koordinasi instansi pengelola lalu lintas • Mendorong dan

VISI: MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG

NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			<ul style="list-style-type: none"> • SDM teknis di bidang perhubungan masih terbatas • Fasilitas orang berkebutuhan khusus belum optimal 	Meningkatkan kualitas SDM perhubungan sesuai anjuran pemerintah pusat
		Angka kecelakaan lalu lintas masih tingginya	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas • Kurangnya fasilitas keselamatan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu lintas • Mengoptimalkan implement Peraturan daerah
		Pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dan Udara dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat guna pengembangan konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana transportasi perairan jasa pelayanan transportasi belum optimal • Terbatasnya kewenangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya potensi destinasi wisata dan perubahan status pelabuhan regional menjadi kewenangan daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah Visi “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah Dengan misi

- Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

Kementerian Perhubungan diharapkan akan mendorong Indonesia menjadi negara Indonesia unggul di tahun 2024 dengan ekspektasi sebagai berikut.

1. Meningkatkan pertumbuhan produktifitas nasional yang mendukung pertumbuhan nasional dengan 6 persen.
2. Penurunan biaya logistik yang berdampak pada peningkatan industri manufaktur dengan angka 7 persen.
3. Pengembangan 5 destinasi pariwisata baru kelas dunia untuk mendukung devisa sektor pariwisata sehingga tercapai suatu penerimaan (pemasukan negara) yang luar biasa.
4. Kinerja layanan perhubungan mencapai indeks kepuasan layanan dengan semua

Dinas perhubungan mendukung misi kementerian perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, dimana sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan yaitu Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah dan Keselamatan Lalu Lintas transportasi publik, beberapa hal faktor penghambat dan pendorong yang sangat mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas perhubungan.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi NTB
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA 2020 - 2024	PERMASALAHAN PELAYANAN DISHUB PROVINSI NTB	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	Masih kurangnya pelayanan sarana dan transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat guna pengembangan konektivitas menuju daerah wisata dan kawasan strategis	Kurangnya sarana transportasi yang melayani daerah terpencil guna meningkatkan kesejahteraan daerah	Bantuan dari Pemerintah Pusat untuk melayani masyarakat daerah terpencil melalui Subsidi Bus Perintis dan angkutan laut perintis
		Terbatasnya peralatan teknologi untuk pengawasan dan pemantauan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan	Terdapat kendaraan yang tidak memenuhi standart Emisi Gas Buang	Tersedianya Perpres ttg RAN GRK
		Kurangnya fasilitas keselamatan jalan	Kurangnya pendanaan untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan	Tersusunnya perda tentang fasilitas keselamatan transportasi melalui inisiatif DPRD
		Belum tersedianya angkutan masal perkotaan yang aman, nyaman dan berkepastian	Pengelolaan BRT (Bus Rapid Transit) dilakukan oleh BUMN (Perum Damri) dan membutuhkan biaya operasional yang tinggi	Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk membantu penyediaan angkutan dan biaya operasional BRT
2	Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah	Masih kurangnya SDM teknis di bidang Perhubungan	Terbatasnya anggaran Diklat Teknis di Bidang Perhubungan	Tersedianya diklat teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-NTB

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, maka hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mampu bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB bersama Dinas Perhubungan Kabupaten/ kota dan perangkat daerah terkait lainnya berupaya untuk menyelaraskan, mensinergikan, mensinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, Hal ini dimaksudkan agar antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling mendukung visi misi NTB Gemilang.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan potensi wisata yang sangat besar. Sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata super prioritas, pengembangan transportasi di Nusa Tenggara Barat terus dilakukan agar berbagai jenis destinasi pariwisata mampu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Sektor ini memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Mengingat peranan strategis sektor pariwisata yang begitu besar pengembangan aksesibilitas untuk menunjang konektivitas antarwilayah di Nusa Tenggara Barat harus direncanakan dengan matang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemetaan Tata Ruang Sistem Transportasi Nasional berada pada Jalur Sabuk Selatan Transportasi Darat Lintas Aceh – Kupang/NTT dan secara geografis terletak antara 08° 10' - 09° 05' Lintang Selatan dan 115° 46' - 119° 05' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores.
- Sebelah Timur : Selat Sape, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
- Sebelah Barat : Selat Lombok, Provinsi Bali.



Gambar 3.1
Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi NTB terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan luas daratan 20.153,15 km² dan luas perairan laut 29.159,04 km². Perbandingan luas daratan dari dua pulau utama tersebut yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,70 km² (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,50 km² (76,49%). Di sekitar pulau tersebut terdapat ± 332 pulau-pulau kecil (sekitar 282 pulau diantaranya telah memiliki nama) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Provinsi NTB terdiri dari 8 Kabupaten 2 Kota.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan potensi wisata yang sangat besar. Sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata super prioritas, pengembangan transportasi di Nusa Tenggara Barat terus dilakukan agar berbagai jenis destinasi pariwisata mampu menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Pengguna sepeda masih sangat terbatas walaupun pada akhirnya

sebagian kecil masyarakat sadar akan kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan dalam memilih moda transportasi ini (sepeda). Namun, prasarana pendukung seperti lajur khusus sepeda sangat terbatas sehingga tidak memberikan penyediaan tingkat keselamatan pengguna sepeda yang implikasinya membuat pertumbuhan pengguna sepeda tidak sebesar pengguna kendaraan pribadi.

Sebagai warga negara yang merdeka, seluruh masyarakat NTB memiliki hak yang sama, yakni terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan secara umum termasuk dalam berkendara umum. Hak kebebasan dalam transportasi yang dimaksud utamanya dilihat dari berbagai fasilitas dan moda transportasi umum yang harus disediakan. Sasaran utama para pengguna yang dimaksud meliputi orang tua, ibu hamil, kaum difabel, dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kelompok ini rentan terhadap berbagai hambatan saat menggunakan fasilitas maupun moda transportasi umum.

Selain itu, diperlukan perencanaan darurat bencana dalam sistem transportasi mengingat daerah NTB berada pada daerah rawan gempa sehingga diperlukan mitigasi khusus bagaimana pengangkutan penyelamatan ketika bencana terjadi atau bagaimana distribusi kebutuhan pokok masyarakat terdampak gempa pasca bencana terjadi. Terdapat beberapa pulau kecil di sekitar Pulau Lombok dan Sumbawa yang berpotensi rawan dampak gempa (tsunami) untuk dipertimbangkan.

Fenomena terbaru saat ini adalah merebaknya pandemi Covid-19 yang dapat di rasakan di seluruh dunia. Perencanaan transportasi di NTB harus dapat disesuaikan dengan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 ini. Melalui kebijakan yang harus diterapkan baik ketika berada di dalam sarana angkutan umum maupun prasarana penunjangnya. Transportasi di NTB harus dapat berperan dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19 mengingat satu-satunya penyebab Covid-19 menyebar adalah karena adanya pergerakan masyarakat dari dan ke NTB. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD sebagai berikut :

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat beradasarka Tabel 3.4.1 berikut :

Tabel 3.4.1 Telaahan RTRW Terhadap Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

NO	Kebijakan RTRW	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Pengembangan system jaringan transportasi darat,laut dan udara untuk mendukung Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah	Konektivitas dalam wilayah dan antar wilayahMasih kurang	Trayek angkutan darat dan laut belum seluruhnya terisi oleh pengusaha angkutan.	NTB merupakan salah satu destinasi super prioritas KEK Mandalika mendukung event internasional Moto GP
			Integrasi angkutan belum optimal	menguatkan integrasi infrastruktur untuk berbagai moda transportasi, baik darat, laut dan udara, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan integrasi layanan transportasi, meningkatkan investasi sektor swasta
		Rendahnya kesadaran pada kaum disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas khusus kaum disabilitas pada sarana dan prasarana angkutan umum belum optimal 	Pemerataan pelayanan transportasi

NO	Kebijakan RTRW	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		Tingginya penyebaran Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutusan penyebaran Covid-19 pada sarana dan prasarana angkutan umum belum optimal 	Kesehatan pengguna jasa transportasi
		Daerah NTB merupakan daerah rawan bencana alam	Belum adanya rute evakuasi bencana alam	Aksesibilitas rute evakuasi pada daerah rawan bencana untuk mencapai keselamatan

3.4.2 Telaah KLHS RPJMD

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat beradasarka Tabel 3.4.2 berikut :

Tabel 3.4.2 Telaahan KLHS RPJMD Terhadap Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

NO	Kebijakan RTRW/ KLHS	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Pengembangan sistem jaringan transportasi darat,laut dan udara untuk mendukung Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah	Minat masyarakat terhadap penggunaan sepeda sebagai alat transportasi masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya infrastruktur untuk sepeda • Minat masyarakat untuk berjalan kaki masih rendah Belum optimalnya pembatasan kualitas emisi gas buang angkutan umum	Transportasi ramah lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Visi misi NTB Gemilang kedepannya.

Sistem transportasi berkelanjutan menjadi salah satu solusi yang mampu menyediakan akses untuk kebutuhan dasar masyarakat. Transportasi dapat disebut berkelanjutan apabila flexible, mudah beradaptasi dan diatur dengan regulasi yang baik. Selain itu mampu memenuhi unsur keselamatan, keamanan tanpa menurunkan kualitas kesehatan manusia dan ekosistem.

Dalam situasi pandemic Covid-19 ini Dinas Perhubungan harus dapat melayani masyarakat secara maksimal. Protokol kesehatan harus diterapkan dalam setiap pelayanan transportasi di NTB disamping itu NTB juga merupakan daerah rawan bencana yang harus kita waspandai bersama untuk mendukung visi NTB yaitu NTB tangguh dan mantap dengan penguatan infrastruktur serta konektivitas transportasi yang handal. Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan KEK Mandilika yang menjadi salah satu super prioritas sebagai destinasi pariwisata baru kelas dunia untuk mendukung devisa sektor pariwisata sehingga tercapai suatu penerimaan (pemasukan negara) yang luar biasa.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan; dan identifikasi masalah tersebut diatas yang disajikan pada Subbab 3.1 sampai dengan Subbab 3.4, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan hal ini tergambar dalam Tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.4

Isu - Isu Strategis Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

NO	MASALAH	ISU
1	Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat menuju daerah wisata, kawasan strategis, kawasan potensial dan event internasional motoGP	Rendahnya konektivitas transportasi
2	Belum tersedianya angkutan masal perkotaan dan angkutan multimoda yang belum optimal	
3	Kurangnya fasilitas penunjang operasional Pelabuhan di Prov. NTB	
4	Masih kurangnya SDM teknis di bidang Perhubungan Laut	
5	Belum optimalnya operasional dan Pengelolaan Terminal penumpang tipe B di provinsi NTB	
6	Masih kurangnya SDM teknis di bidang Pengelolaan Terminal	
7	Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas	
8	Masih kurangnya PPNS Perhubungan	
9	Minat masyarakat terhadap penggunaan sepeda sebagai alat transportasi masih rendah	
10	Belum optimalnya infrastruktur untuk sepeda	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas
11	Minat masyarakat untuk berjalan kaki masih rendah	Kurangnya fasilitas keselamatan jalan
12	Belum optimalnya pembatasan kualitas emisi gas buang angkutan umum	Transportasi ramah lingkungan
13	Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus kaum difabel pada sarana dan prasarana angkutan umum	Rendahnya kesadaran pada kaum difabel
14	Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus kaum difabel pada di pelabuhan	
15	Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus	

NO	MASALAH	ISU
16	kaum difabel pada di angkutan laut dan penyebrangan	
17	Belum optimalnya pemutusan penyebaran Covid-19 pada sarana dan prasarana angkutan umum	Tingginya penyebaran Covid-19
18	Belum optimalnya pemutusan penyebaran Covid-19 pada sarana dan prasarana angkutan laut dan penyeberangan	
19	Belum adanya rute evakuasi bencana alam	Daerah NTB merupakan daerah potensi gempa bumi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi NTB Gemilang dan melaksanakan **Misi I - NTB Tangguh dan Mantap** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Tujuan ini menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan sektor transportasi di Provinsi NTB dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, untuk sektor transportasi, Tujuannya adalah **"Terwujudnya Aksesibilitas Antar Wilayah Untuk Pengembangan Sektor Unggulan"**. Untuk mewujudkan tujuan ini, sasaran pembangunan sektor transportasi adalah **"Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah"**. Sasaran di dalam RPJMD ini yang diadaptasi menjadi Tujuan Dinas Perhubungan yaitu **"Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah"**.

4.1.2. Sasaran

Sasaran dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur, dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. pada Dinas Perhubungan terdapat 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas layanan transportasi
2. Meningkatkan keselamatan transportasi darat

Sasaran ini menjawab tantangan dan isu strategis untuk pemenuhan layanan transportasi publik dengan infrastruktur transportasi yang terbatas di Provinsi NTB. Provinsi NTB yang merupakan provinsi kepulauan dengan 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta pulau-pulau kecil yang berada disekitarnya,

membutuhkan integrasi layanan transportasi publik di bidang darat, laut, dan udara. Secara rinci dapat dijabarkan pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan konektivitas antar wilayah		Persentase Konektivitas transportasi publik	76,70	79,43	81,71	86,86	89,14
		Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	Persentase Rute Angkutan Darat	92,31	91,67	92,50	95,00	96,67
			Persentase Rute Angkutan Laut	62,50	50,00	57,69	61,54	65,38
		Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Rasio Fatalitas	3,24	3,13	3,03	2,93	2,84

Tabel 4. 2

Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran Dishub Provinsi NTB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas transportasi publik	76,70	79,43	81,71	86,86	89,14

BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dinas Perhubungan Provinsi NTB memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan sistem transportasi berkelanjutan di masa mendatang. Strategi dan arah kebijakan sistem transportasi harus memperhatikan konsep-konsep sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan penggunaan angkutan umum, berjalan kaki, dan bersepeda. Disamping itu, pembangunan sistem transportasi harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terutama Kawasan Strategis Provinsi dengan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar dampak pembangunan sistem transportasi dapat mendukung keberlanjutan ekonomis dari titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Transportasi berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat selama menggunakan layanan transportasi umum.

Penyusunan regulasi di daerah untuk sektor transportasi terkait dengan isu strategis Covid-19, bencana alam, perubahan iklim, gender dan disabilitas/masyarakat berkebutuhan khusus, *Sustainable Development Goals* (SDGs) perlu memperhatikan aspek hukum, aspek teknis, serta aspek penting lainnya seperti aspek sosiologis, dan aspek komunikasi publik. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar regulasi atau peraturan terkait sektor transportasi dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

Dinas Perhubungan turut serta dalam Misi Pertama yaitu NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Pencapaian misi pertama ini diwujudkan melalui strategi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu "**Mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah**" dengan indikator tujuan yaitu "**Persentase Konektivitas transportasi publik**". Strategi ini mencakup beberapa agenda penting yaitu meningkatkan integrasi jejaring transportasi dengan pusat-pusat pertumbuhan pada Kawasan-kawasan strategis provinsi sesuai arahan RTRW Provinsi NTB. Pemanfaatan platform TIK untuk menghubungkan penyedia dan pengguna layanan transportasi publik. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif



dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Visi, Misi dan Program Strategis/Program Unggulan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB “Mewujudkan konektivitas antar wilayah” adalah:

1. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung pariwisata dan event internasional MotoGP.
2. Menyediakan jasa pelayanan sektor transportasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
3. Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan integrasi antarmoda dan intermodal untuk angkutan umum Angkutan penyebrangan, Angkutan pelayaran rakyat, dan sepeda.
4. Menyiapkan regulasi daerah di sektor transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah strategis, dan mengantisipasi isu strategis terkait Covid-19, gender dan disabilitas, kebencanaan, perubahan iklim, dan SDGs.
5. Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui upaya meningkatkan manajemen keselamatan jalan, meningkatkan jalan berkeselamatan, meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan, sosialisasi keselamatan bagi pengguna jalan, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait terkait penanganan kecelakaan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, spesifik, fokus, konkrit, dan aplikatif untuk mencapai tujuan pembangunan sektor transportasi di Provinsi NTB. Kebijakan di sektor transportasi diperlukan untuk membantu mengarahkan pengambilan keputusan terkait rencana program dan kegiatan yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dalam membangun sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Kebijakan ini merupakan sinergi dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, sebagai rangkaian alur logis perencanaan pembangunan sistem transportasi berkelanjutan di Provinsi NTB.

Dalam penjabaran sasaran pembangunan di level provinsi, Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi bagian yang terkoneksi dan sejalan dengan sasaran pembangunan. Arah kebijakan Dinas Perhubungan dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu Konektivitas, Keselamatan, dan Kenyamanan Transportasi.

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB

VISI : NTB Gemilang				
MISI I. NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur wilayah				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Konektivitas Antar Wilayah	1. Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konektivitas antar wilayah yang berkualitas 2. Menyediakan jasa pelayanan sektor transportasi darat yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 3. Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan integrasi antarmoda dan intermodal untuk angkutan umum, jalan kaki, dan sepeda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Kualitas sarana prasarana transportasi darat menghubungkan wilayah strategis dan kawasan potensial 2. Mengembangkan sarana prasarana transportasi, laut, dan ASDP yang menghubungkan wilayah strategis 3. Penerapan bantuan operasional /subsidi transportasi

VISI : NTB Gemilang**MISI I. NTB Tangguh dan Mantap** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur wilayah

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Meningkatnya Keselamatan transportasi darat	Meningkatkan kualitas manajemen transportasi dan ketersediaan fasilitas keselamatan (faskel) lalu lintas	Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, pengamanan pengenilaian lalulintas, sosialisasi keselamatan transportasi dan SDM perhubungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019-2020 Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Rencana program dan kegiatan, indikator dan pendanaan indikatif tahun 2019-2020 selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2020 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 diuraikan sebagaimana pada tabel 6.1. Adapun program yang sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
11. Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat
12. Program PengembanganTransportasi Laut

6.2. Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021-2023 Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Rencana program dan kegiatan, indikator dan pendanaan indikatif tahun 2021-2023 yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan revisi RPJMD NTB Tahun 2019-2023 disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan diuraikan pada tabel 6.2 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran

Tabel 6. 1
Rencana Program & Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2020
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Pelayanan	2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	2.291.666.810,00	100	2.429.162.922,00							
	2.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar	Surat	1900	2000	3.500.000,00	2100	3.710.007,00							
	2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jenis	5	5	262.650.000,00	5	278.409.000,00							
	2.09.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis perlengkapan dan peralatan kantor	Jenis	5	5	27.500.000,00	5	29.150.000,00							
	2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	20	20	15.300.000,00	20	16.218.000,00							
	2.09.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	Orang	9	9	102.739.995,00	9	108.904.392,00							
	2.09.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Orang	38	36	869.443.200,00	11	860.508.000,00							
	2.09.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis			-	0	-							
	2.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	Jenis	45	43	65.902.574,00	19	69.197.707,00							
	2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	12	9	41.994.999,00	9	44.094.744,00							
	2.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	15	12	13.668.000,00	12	14.351.400,00							
	2.09.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	54	52	73.014.968,00	52	110.395.844,00							
	2.09.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Eksplar bahan bacaan (surat kabar)	Eksemplar	60	36	33.374.988,00	15	35.377.488,00							
2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan	Orang/ kali	3500	2477	93.749.496,00	846	111.217.300,00								



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.09.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat	Dokumen	0	43	236.765.998,00	22	284.148.672,00						
		2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Tehnis Perkantoran	Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran	Orang	3	3	113.443.998,00	3	120.250.638,00						
		2.09.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SPPD Dalam Daerah program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Dokumen	120	108	144.861.912,00	88	186.730.518,00						
		2.09.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Meningkatnya keamanan kantor	Orang	7	7	193.756.672,00	6	156.499.200,00						
	Meningkatnya Ketersediaan sarana dan Prasarana Perkantoran	2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Saranan Prasarana Aparatur	%	100	100	436.344.799,89	100	2.423.343.356,00						
		2.09.01.02.10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah pengadaan meubelair kantor yang memadai	Jenis	1	3	9.270.000,00	4	15.000.000,00						
		2.09.01.02.11	Pengadaan UPS/ Stabilizer, Komputer dan Alat-alat Elektronik	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	10	2	21.752.000,00	5	22.839.600,00						
		2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jenis	3	1	34.000.000,00	1	495.614.816,00						
		2.09.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	21	21	335.622.799,89	21	352.403.940,00						
		2.09.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan kerja yang baik	Jenis	12	12	35.700.000,00	12	37.485.000,00						
		2.09.01.02.42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung yang di rehabilitasi	Paket	0	0	-	1	1.500.000.000,00						
	Meningkatnya SDM Aparatur	2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur Yang Mengikuti Diklat	%	17,05	28,41	27.640.000,00	39,77	79.022.000,00						
		2.09.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah penceramah (Dai) dan pemandu senam	Orang/ jam	302	302	27.640.000,00	302	29.022.000,00						
		2.09.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah peningkatan SDM	Orang	10	-	-	2	50.000.000,00						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.09.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	100	157.549.300,00	100	165.426.765,00						
		2.09.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	2	2	45.693.800,00	2	47.978.490,00						
		2.09.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	Dokumen	1	1	21.693.000,00	1	22.777.650,00						
		2.09.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan SKPD (RKA/DPA, RKAP/DPPA dan Rencana Kerja)	Dokumen	4	4	90.162.500,00	3	94.670.625,00						
		2.09.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Aset Yang Dimanfaatkan	%	100	100	35.278.000,00	100	37.041.900,00						
		2.09.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen	1	1	35.278.000,00	1	37.041.900,00						
Mewujudkan Konektivitas Transportasi Yang Berkeselamatan	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi menuju Kawasan Strategis dan Destinasi Wisata Utama	2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan yang selaras dengan RTRW (jumlah dokumen yang selaras RTRW/dokumen yg dibuat)	%	13,79	55,00	2.937.635.000,00	65,00	731.998.750,00						
		2.09.01.15.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan	Dokumen	0	6	2.907.160.000,00	3	425.000.000,00						
		2.09.01.15.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Dokumen	1	1	30.475.000,00	1	31.998.750,00						
		2.09.01.15.03	Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal	Jumlah Dokumen pengembangan terminal	Paket	2	0	-	2	275.000.000,00						
		2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan yang layak	%	0,00	100,00	95.650.000,00	100,00	320.182.500,00						
		2.09.01.16.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah Fasilitas penunjang yang di bangun	Paket	0	1	95.650.000,00	1	100.432.500,00						
		2.09.01.16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ	Jumlah Fasilitas keselamatan LLAJ yang terpelihara	Jenis	0	0	-	5	219.750.000,00						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.09.01.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase kecelakaan kendaraan bermotor angkutan umum	%	71,95	79,12	1.329.240.301,00	3,27	1.856.703.365,00						
				Cakupan Kendaranaan Angkutan Umum Laik Jalan di Terminal	%				70,00							
				Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Masuk di Terminal Sesuai Jadwal	%				65,00							
				Cakupan Jenis Layanan Retribusi Terminal Sesuai Dengan Perda	%				50,00							
		2.09.01.17.14	Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah peserta pembinaan/sosialisasi pengusaha angkutan barang dan Terpilihnya Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi NTB untuk mewakili NTB di tingkat nasional	Orang	2	2	116.740.000,00	2	122.577.000,00						
		2.09.01.17.18	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	Jumlah pengamanan arus lalu lintas kendaraan bermotor pada hari besar	Kali	3	4	247.905.000,00	3	260.300.250,00						
		2.09.01.17.19	Pengembangan lalu lintas Angkutan Jalan	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan yang Dievaluasi	Lokasi	6	6	749.716.800,00	3	787.202.640,00						
		2.09.01.17.20	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Angkutan	Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki Ijin	Unit	1229	1239	55.852.500,00	1249	58.645.125,00						
		2.09.01.17.21	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	Jumlah trayek angkutan umum penumpang	Trayek	1		-	3	400.000.000,00						
		2.09.01.17.22	Peningkatan/ pengembangan Angkutan transportasi Udara se NTB	Jumlah Penumpang Angkutan Udara di 3 bandara	Orang	4.205.496	4.331.661	26.363.200,00	4.461.611	27.681.360,00						
		2.09.01.17.23	Pengendalian Pengelolaan dan Pengawasan Terminal	Jumlah kendaraan angkutan yang laik setelah ramp chek	Unit	0	50	132.662.801,00	58	-						
		2.09.01.17.24	Pengawasan dan Pengendalian Terminal	Jumlah angkutan umum yang di awasi di	Kendaraan	0	50	-	58	100.119.990,00						
		2.09.01.17.25	Pembinaan Penertiban, pengelolaan Operasional Terminal	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum yang Masuk di Terminal	Kendaraan	0	10	-	18.000	100.177.000,00						
				Jumlah Penerimaan layanan retribusi di terminal	Rp./juta				220							



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.09.01.22	Program Pengembangan Transportasi Laut	Persentase Sarana Prasarana Fasilitas Pelayaran dalam Kondisi Baik	%	-15,00	5,00	1.172.184.200,00	5,00	1.235.993.004,00						
		2.09.01.22.01	Peningkatan/pengembangan keselamatan pelayaran	Jumlah lintasan yang diawasi	Lintasan	2	20	201.767.800,00	20	213.873.868,00						
		2.09.01.22.02	Peningkatan/pengembangan Kepelabuhan di NTB	Jumlah Dokumen Database Kepelabuhanan	Dokumen	0	10	52.091.400,00	10	75.000.000,00						
		2.09.01.22.04	Peningkatan/pengembangan Angkutan Laut di NTB	Jumlah rute Konektivitas yang terbangun	Rute	0	1	918.325.000,00	1	947.119.136,00						
		2.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	%	50	50	-	50,00	30.000.000.000,00						
		2.09.01.18.05	Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	Jumlah Fasilitas Pelabuhan	unit	0	0	-	1	30.000.000.000,00						
		2.09.01.18.06	Pembangunan prasarana perhubungan darat	Jumlah Halte BRT yang dibangun	Halte	0	0									
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	2.09.01.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase perlengkapan jalan baik	%	0,00	3,24	293.250.000,00	40,00	1.361.221.600,00						
		2.09.01.19.04	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	Jenis	3	1	211.140.000,00	3	1.162.000.000,00						
		2.09.01.19.06	Penyusunan informasi/database fasilitas keselamatan jalan	Jumlah dokumen informasi fasilitas jalan di NTB	Ruas Jalan	0	0	-	27	112.185.000,00						
		2.09.01.19.11	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi darat	Orang	2	2	82.110.000,00	2	87.036.600,00						
		2.09.01.21	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	Prosentase kendaraan bermotor angkutan umum laik jalan dan angkutan penyeberangan laik layar	%	71,95	79,12	91.963.200,00	79,76	211.066.800,00						
		2.09.01.21.01	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi Dokumen Andalalin	Dokumen	5		-	5	38.000.000,00						
		2.09.01.21.02	Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan	Jumlah Terpilihnya kab/Kota Tertib Lalu lintas	Kab/Kota	2	2	37.183.200,00	2	40.000.000,00						
		2.09.01.21.03	Evaluasi Sistem Transportasi ASDP	Jumlah kapal lulus uji SPM	Unit		22	54.780.000,00	22	58.066.800,00						
		2.09.01.21.04	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca	Jumlah Lokasi Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Lokasi	1	0	-	2	25.000.000,00						
		2.09.01.21.05	Peningkatan SDM Transportasi	Jumlah SDM Perhubungan yang mengikuti Pendidikan	Orang	0	0	-	20	50.000.000,00						
								8.868.401.610,89		40.851.162.962,00						



Tabel 6.2
Rencana Program & Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2023
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip OPD	Nilai						BB (72,19)	8,493,104,390.00	BB (75,00)	9,241,680,803.02	A (80,00)	10,233,738,253.12	A (80,00)	27,968,523,446.14	Sekretariat		
		2.15.01.101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen						8	66,860,000.00	8	72,048,300.00	9	80,161,750.00	25	219,070,050.00	Sub Bag Program		
		2.15.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan SKPD dan Renstra	Dokumen						1	8,720,000.00	1	9,504,800.00	2	10,455,000.00	4	28,679,800.00	Sub Bag Program	Mataram	
		2.15.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen						1	8,737,900.00	1	9,524,300.00	1	10,476,750.00	3	28,738,950.00	Sub Bag Program	Mataram	
		2.15.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen						1	8,720,000.00	1	9,504,800.00	1	10,455,000.00	3	28,679,800.00	Sub Bag Program	Mataram	
		2.15.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	Dokumen						1	8,720,000.00	1	9,504,800.00	1	10,455,000.00	3	28,679,800.00	Sub Bag Program	Mataram	
		2.15.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen						1	8,720,000.00	1	9,504,800.00	1	10,455,000.00	3	28,679,800.00	Sub Bag Program	Mataram	
		2.15.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen						2	8,720,000.00	2	9,504,800.00	2	10,455,000.00	6	28,679,800.00	Sub Bag Program	Mataram	
		2.15.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen						1	14,522,100.00	1	15,000,000.00	1	17,410,000.00	3	46,932,100.00	Sub Bag Program	Mataram	
		2.15.01.102	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	Orang/ bulan						1134	6,336,737,715.00	1139	6,906,911,353.02	1144	7,597,606,153.12	1144	20,841,255,221.14	Sub Bag Keuangan		
		2.15.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan	Orang/ bulan						1050	1134	6,301,118,315.00	1139	6,868,086,453.02	1144	7,554,898,853.12	1144	20,724,103,621.14	Sub Bag Keuangan	Mataram
		2.15.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	Orang/ bulan						108	24,024,000.00	108	26,186,000.00	108	28,804,600.00	324	79,014,600.00	Sub Bag Keuangan	Mataram	
		2.15.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	Dokumen						1	11,595,400.00	1	12,638,900.00	1	13,902,700.00	3	38,137,000.00	Sub Bag Keuangan	Mataram	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.15.01. 103	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen						1	14,763,000.00	1	16,920,500.00	1	18,612,500.00	3	50,296,000.00	Sub Bag Umum	
		2.15.01. 103. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen						1	3,446,000.00	1	4,585,000.00	1	5,043,500.00	3	13,074,500.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 103. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi Aset Dishub	Dokumen						1	11,317,000.00	1	12,335,500.00	1	13,569,000.00	1	37,221,500.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 105	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan SDM	Orang						3	64,150,000.00	4	75,000,000.00	86	180,000,000.00	93	319,150,000.00	Sub Bag Umum	
		2.15.01. 105. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah setel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	setel							-			80	80,000,000.00	80	80,000,000.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 105. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang ASN yang mengikuti dilkat	Orang						3	64,150,000.00	4	75,000,000.00	6	100,000,000.00	13	239,150,000.00	Sub Bag Umum	Luar Daerah
		2.15.01. 106	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan adminitiasi umum	kegiatan						7	537,753,075.00	7	589,146,650.00	7	648,799,500.00	7	1,775,699,225.00	Sub Bag Umum	
		2.15.01. 106. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis						12	7,645,000.00	12	12,000,000.00	12	13,200,000.00	36	32,845,000.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 106. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Unit						5	44,243,700.00	6	48,225,600.00	6	53,048,100.00	17	145,517,400.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 106. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	Jenis						43	45,720,375.00	43	49,835,200.00	43	54,818,700.00	43	150,374,275.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 106. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis						9	52,354,000.00	9	57,065,850.00	9	62,772,500.00	27	172,192,350.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 106. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar bahan bacaan (surat kabar)	Eksemplar						1460	9,790,000.00	1460	10,000,000.00	1460	11,738,200.00	4380	31,528,200.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 106. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan	Orang/ kail						1850	113,000,000.00	2100	123,170,000.00	2250	135,487,000.00	6200	371,657,000.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 106. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah program pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat	Dokumen						188	265,000,000.00	198	288,850,000.00	210	317,735,000.00	596	871,585,000.00	Sub Bag Umum	NTB



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.15.01. 107	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	unit						10	200,680,000.00	13	185,000,000.00	12	134,750,000.00	35	520,430,000.00	Sub Bag Umum	
		2.15.01. 107.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	unit						10	200,680,000.00	2	60,000,000.00		-	12	260,680,000.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit pengadaan mebel kantor yang memadai	unit							-	3	50,000,000.00	2	50,000,000.00	5	100,000,000.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit							-	8	75,000,000.00	10	84,750,000.00	18	159,750,000.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 108	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang	kegiatan						4	1,020,441,000.00	4	1,122,280,600.00	4	1,234,508,650.00	4	3,377,230,250.00	Sub Bag Umum	
		2.15.01. 108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar & masuk	Surat						2200	2,000,000.00	2300	2,180,000.00	2400	2,398,000.00	6900	6,578,000.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Rekening						180	315,645,000.00	180	344,053,000.00	180	378,458,300.00	180	1,038,156,300.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 108.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis perlengkapan dan peralatan kantor	Jenis						4	36,390,000.00	4	39,665,100.00	4	43,631,600.00	15	119,686,700.00	Sub Bag Umum	Mataram
		2.15.01. 108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang jasa kebersihan dan keamanan kantor	Orang/ bulan						246	666,406,000.00	246	736,382,500.00	246	810,020,750.00	246	2,212,809,250.00	Sub Bag Umum	Mataram
				Jumlah Orang penceramah (Dai) dan pemandu senam	Orang kali / jam								288		302		302		892	
		2.15.01. 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan pemeliharaan BMD	kegiatan						4	251,719,600.00	4	274,373,400.00	4	339,299,700.00	4	865,392,700.00	Sub Bag Umum	
		2.15.01. 109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Unit						1	25,000,000.00	1	27,250,000.00	1	29,975,000.00	1	82,225,000.00	Sub Bag Umum	Mataram



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.15.01. 109. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah unit yang terpelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit						29	186,759,600.00	29	203,567,000.00	29	223,924,700.00	29	614,251,300.00	Sub Bag Umum	Mataram	
		2.15.01. 109. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Paket						1	39,960,000.00	1	43,556,400.00	1	85,400,000.00	3	168,916,400.00	Sub Bag Umum	Mataram	
Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah dan Keselamatan Lalu Lintas transportasi publik	1. Meningkatkan konektivitas layanan transportasi	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	70.31					50.83	4,435,624,620.00	80.40	4,694,778,700.00	81.63	5,534,756,500.00	81.63	14,665,159,820.00	Bid Lalu Lintas Jalan		
				Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	92.31					94.37		98.59		100.00		100.00		100.00		Bid. Angkutan Jalan
	2. Meningkatkan keselamatan transportasi darat			Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%							30.00		35.00		40.00		40.00		Bid. Angkutan Jalan	
				Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%							46.20		49.39		52.58		52.58		Bid Lalu Lintas Jalan	
			2.15.02. 102	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis						1	345,000,000.00	2	345,000,000.00		-	3	690,000,000.00	Bid Lalu Lintas Jalan	
			2.15.02. 102. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang terpasang	Jenis						1	345,000,000.00	1	200,000,000.00		-	2	545,000,000.00	Kasi Prasarana Lalu Lintas	Kab Dompu, Sumbawa
			2.15.02. 102. 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis							-	1	145,000,000.00		-	1	145,000,000.00	Kasi Prasarana Lalu Lintas	NTB
			2.15.02. 103	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang memadai	Dokumen						5	850,852,000.00	6	927,427,700.00	8	1,320,170,500.00	19	3,098,450,200.00	Bid. Angkutan Jalan	NTB
			2.15.02. 103. 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen						1	85,712,000.00	1	93,426,000.00	1	102,768,600.00	3	281,906,600.00	Kasi Pengelolaan Terminal	NTB
			2.15.02. 103. 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung terminal yang dibangun	Paket							-		-	1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	Kasi Pengelolaan Terminal	Kab Dompu
		2.15.02. 103. 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen						3	596,798,000.00	4	650,509,000.00	5	715,559,900.00	12	1,962,866,900.00	Kasi Pengelolaan Terminal	NTB	
		2.15.02. 103. 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Dokumen Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Paket						1	168,342,000.00	1	183,492,700.00	1	201,842,000.00	3	553,676,700.00	Kasi Pengelolaan Terminal	NTB	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.15.02. 105	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen manajemen reKayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen						20	758,791,000.00	21	827,082,000.00	24	909,790,200.00	60	2,495,663,200.00	Bid Lalu Lintas Jalan	NTB
		2.15.02. 105. 01	Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRL dan DRK	Dokumen						18	458,791,800.00	18	500,083,000.00	20	550,091,300.00	56	1,508,966,100.00	Kasi Manajemen ReKayasa lalu Lintas	NTB
		2.15.02. 105. 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	Jumlah Dokumen kasus pelanggaran angkutan umum berkurang	Dokumen						2	299,999,200.00	3	326,999,000.00	4	359,698,900.00	4	986,697,100.00	Kasi Manajemen ReKayasa lalu Lintas	NTB
		2.15.02. 107	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	unit						66	249,133,900.00	78	271,555,000.00	90	298,710,500.00	90	819,399,400.00	Bid. Lalu Lintas Jalan & Bid. Angkutan Jalan	NTB
				Jumlah UPUBKB yang terbina	unit						9		9		9		9			
		2.15.02. 107. 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Dibina	Unit						9	99,999,900.00	9	108,999,000.00	9	119,898,900.00	9	328,897,800.00	Seksi Keselamatan Lalu Lintas	NTB
		2.15.02. 107. 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pemeriksaan kendaraan Angkutan Umum di terminal (Ramp Check)	Unit Kendaraan						66	149,134,000.00	78	162,556,000.00	90	178,811,600.00	90	490,501,600.00	Seksi Pengelolaan Terminal	NTB
		2.15.02. 108	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan umum subsidi	Trayek						5	1,831,847,720.00	6	1,996,714,000.00	8	2,196,385,300.00	8	6,024,947,020.00	Bid Lalu Lintas Jalan	NTB
		2.15.02. 108. 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Bus Disabilitas yang bersubsidi	Trayek						5	1,531,860,720.00	6	1,669,728,200.00	8	1,836,701,000.00	8	5,038,289,920.00	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang;	Kota Mataram, Sumbawa, Dompu, Bima
		2.15.02. 108. 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas	Kab/ Kota						10	299,987,000.00	8	326,985,800.00	9	359,684,300.00	27	986,657,100.00	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang;	NTB



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.15.02. 110	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek AKDP di Provinsi NTB	Dokumen							-			-	1	350,000,000.00	1	350,000,000.00	Bid Lalu Lintas Jalan	Mataram
		2.15.02. 110. 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota	Dokumen							-			-	1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	Kasi Manajemen Rekayasa lalu Lintas	Mataram
		2.15.02. 110. 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen							-			-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	Kasi Manajemen Rekayasa lalu Lintas	Mataram
		2.15.02. 113	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit						498	300,000,000.00	520	218,000,000.00	542	289,800,000.00	542	807,800,000.00	Bid Lalu Lintas Jalan	NTB	
		2.15.02. 113. 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan umum orang dalam trayek yang laik jalan (KPS)	Unit						498	200,000,000.00	520	218,000,000.00	542	239,800,000.00	542	657,800,000.00	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang;	NTB	
		2.15.02. 113. 02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang	Dokumen						1	100,000,000.00			-	1	50,000,000.00	2	150,000,000.00	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang;	NTB
		2.15.02. 114	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan						811	100,000,000.00	846	109,000,000.00	881	169,900,000.00	881	378,900,000.00	Bid. Angkutan Jalan	NTB	
		2.15.02. 114. 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan						811	100,000,000.00	846	109,000,000.00	881	119,900,000.00	881	328,900,000.00	Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa Khusus	NTB	
		2.15.02. 114. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi izin penyelenggaraan angkutan taksi	Dokumen							-			-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa Khusus	NTB



1	2	3	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		20	21
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		18	19		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	Nilai					59.39	563,820,000.00	61.61	764,484,200.00	66.06	932,448,950.00	66.06	2,260,753,150.00	Bidang Pelayaran		
		2.15.03.101	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen					35	61,810,000.00	38	67,372,900.00	40	74,110,000.00	40	203,292,900.00	Bidang Pelayaran	NTB	
		2.15.03.101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen					35	61,810,000.00	38	67,372,900.00	40	74,110,000.00	40	203,292,900.00	Kasi Angkutan Laut	NTB	
		2.15.03.102	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit					21	145,682,000.00	23	158,793,300.00	25	174,672,700.00	25	479,148,000.00	Bidang Pelayaran	NTB	
		2.15.03.102.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit					21	145,682,000.00	23	158,793,300.00	25	174,672,700.00	25	479,148,000.00	Kasi Angkutan Laut	NTB	
		2.15.03.105	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit					22	180,800,000.00	22	196,992,500.00	22	216,691,750.00	22	594,484,250.00	Bidang Pelayaran	NTB	
		2.15.03.105.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit					22	180,800,000.00	22	196,992,500.00	22	216,691,750.00	22	594,484,250.00	Kasi Angkutan Penyeberangan	NTB	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2.15.03. 106	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen						110	35,008,000.00	119	38,158,700.00	122	41,974,500.00	122	115,141,200.00	Bidang Pelayaran	NTB	
		2.15.03. 106. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen						110	35,008,000.00	119	38,158,700.00	122	41,974,500.00	122	115,141,200.00	Bidang Perhubungan Laut & Udara	NTB	
		2.15.03. 107	Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Study Tarif Penyeberangan	Dokumen							-	50,000,000.00			-	1	50,000,000.00	Bidang Pelayaran	NTB	
		2.15.03. 1.07. 01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Study Tarif Penyeberangan	Dokumen							-	1	50,000,000.00			1	50,000,000.00	Bidang Perhubungan Laut & Udara	NTB	
		2.15.03. 108	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional	Dokumen							-	1	100,000,000.00			-	1	100,000,000.00	Bidang Pelayaran	NTB
		2.15.03. 108. 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional	Dokumen							-	1	100,000,000.00			-	1	100,000,000.00	Bidang Perhubungan Laut & Udara	NTB



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2.15.03. 109	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan					1	140,520,000.00	1	153,166,800.00	2	425,000,000.00	4	718,686,800.00	Bidang Pelayaran	NTB	
		2.15.03. 109. 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen DED dan Amdal Pelabuhan Regional yang direncanakan	Dokumen						-		-	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	Kasi Kepelabuhanan	NTB	
		2.15.03. 109. 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan yg diperihara	Paket						-		-	3	50,000,000.00	3	50,000,000.00	Kasi Kepelabuhanan	NTB	
		2.15.03. 109. 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah data pelabuhan	Dokumen					1	140,520,000.00	1	153,166,800.00	1	175,000,000.00	3	468,686,800.00	Kasi Kepelabuhanan	NTB	
											13,492,549,010.00		14,700,943,703.02		16,700,943,703.12		44,894,436,416.14			



Sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Perhubungan setiap tahunnya menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan realisasi anggaran dengan memuat keluaran kegiatan/sub kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan/sub kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.3. Program Unggulan Daerah, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Program Strategis dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan program yang disampaikan sejak saat kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Program strategis dan unggulan merupakan wujud dari visi dan pencapaian misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk mengatasi permasalahan ditengah masyarakat.

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dari 75 (tujuh puluh lima) program unggulan daerah, terdapat 3 (tiga) program unggulan daerah yang terkait dan sekaligus menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu NTB Terkoneksi, Percepatan jalan Mantap, dan Ramah Difabel.

Rencana program unggulan daerah serta kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif yang menjadi tugas fungsi Dinas Perhubungan Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.3
Program Unggulan Daerah dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 - 2023

No	Program Unggulan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Alokasi Anggaran					
					2021		2022		2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NTB Terkoneksi	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	85,712,000.00	1	93,426,000.00	1	102,768,600.00
			2 Pembangunan Gedung Terminal	Paket		-		-	1	300,000,000.00
			3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen	3	596,798,000.00	4	650,509,000.00	5	715,559,900.00
			4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Paket	1	168,342,000.00	1	183,492,700.00	1	201,842,000.00
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	5 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	18	458,791,800.00	18	500,083,000.00	20	550,091,300.00
			6 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	Dokumen	2	299,999,200.00	3	326,999,000.00	4	359,698,900.00
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	7 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	9	99,999,900.00	9	108,999,000.00	9	119,898,900.00
			8 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Unit Kendaraan	66	149,134,000.00	78	162,556,000.00	90	178,811,600.00
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen		-		-	1	300,000,000.00
			10 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen		-		-	1	50,000,000.00
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	498	200,000,000.00	520	218,000,000.00	542	239,800,000.00
			12 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Dokumen	1	100,000,000.00		-	1	50,000,000.00



No	Program Unggulan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Alokasi Anggaran					
					2021		2022		2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	13 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit Kendaraan	811	100,000,000.00	846	109,000,000.00	881	119,900,000.00
			14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen			-	-	1	50,000,000.00
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	15 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Dokumen	35	61,810,000.00	38	67,372,900.00	40	74,110,000.00
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Unit	21	145,682,000.00	23	158,793,300.00	25	174,672,700.00
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	17 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Unit	22	180,800,000.00	22	196,992,500.00	22	216,691,750.00
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	18 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen	110	35,008,000.00	119	38,158,700.00	122	41,974,500.00
		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	19 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			-	1	50,000,000.00	-



No	Program Unggulan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Alokasi Anggaran					
					2021		2022		2023	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	20 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	0	-	1	100,000,000.00	0	-
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen		-		-	1	200,000,000.00
			2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Paket		-		-	3	50,000,000.00
			3 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	1	140,520,000.00	1	153,166,800.00	1	175,000,000.00
			Sub Total 1			2,822,596,900.00		3,117,548,900.00		4,270,820,150.00
2	Percepatan jalan Mantap	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jenis	1	345,000,000.00		200,000,000.00		-
			2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis		-	1	145,000,000.00		-
			Sub Total 2			345,000,000.00		345,000,000.00		-
3	Ramah Difabel	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Trayek	5	1,531,860,720.00	6	1,669,728,200.00	8	1,836,701,000.00
			2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Kab/ Kota	10	299,987,000.00	8	326,985,800.00	9	359,684,300.00
			Sub Total 3			1,831,847,720.00		1,996,714,000.00		2,196,385,300.00
TOTAL 1 + 2+ 3 + 4 :						4,999,444,620.00		5,459,262,900.00		6,467,205,450.00



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi NTB merujuk pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang tertuang dalam Bab IV serta indikator program pada Bab VI. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi NTB merupakan indikator Tujuan yaitu **"Persentase Konektivitas Transportasi Publik "** yang menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan (eselon 2). Disamping itu, Kepala Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab terhadap pencapaian 3 indikator Sasaran yang merupakan bagian dari indikator Tujuan :

1. Persentase rute angkutan darat
2. Persentase rute angkutan laut
3. Rasio fatalitas

Secara rinci, indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan, kondisi awal kinerja (tahun 2019) dan target capaian untuk Tahun 2020-2023 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

No	IndikatorSasaran	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Rute Angkutan Darat	92.31	91,67	92,50	95,00	96,67	96,67
2	Persentase Rute Angkutan Laut	62.50	50,00	57,69	61,54	65,38	65,38
3	Rasio Fatalitas	3.24	3,13	3,03	2,93	2,84	2,84

Untuk mendukung indikator Kinerja Dinas Perhubungan dengan indikator kinerja Program prioritas dengan kondisi awal kinerja (tahun 2019) dan target capaian untuk Tahun 2020-2023 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

No	Program	Indikator Program	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	
1	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	79,12	50,83	80,40	81,03	81,63	81,63	
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	92,31	88,73	94,37	98,59	100,00	100,00	
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik (%)	0	30,00	30,00	35,00	40,00	40,00	
		Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (%)	0	42,99	46,20	49,39	52,58	52,58	
2	Pengelolaan Pelayaran	Nilai Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	0	59,39	61,61	63,83	66,06	66,06	

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB bertujuan untuk merumuskan Langkah strategis dan arah kebijakan dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Hal ini merupakan bagaian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi. Dokumen Renstra ini juga telah mengakomodir berbagai isu strategis global, nasional, dan daerah, sehingga target indikator, fokus, dan lokus dalam Renstra Dinas Perhubungan ini sesuai dengan dinamika perubahan global, nasional, dan regional. Disamping itu, penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan ini telah menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS) agar berdaya guna dan berhasil guna. Ketersediaan anggaran sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah dan tata kelola program strategis dan kegiatan-kegiatan pendukungnya merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan adalah:

1. Dinas Perhubungan menyempurnakan Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan hasil penetapan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 Tahun RPJMD Provinsi Tahun 2019-2023.
2. Bappeda Provinsi NTB telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan review perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, mengacu pada RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024.
3. Dinas Perhubungan menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan NTB Terkoneksi, masukan dari para pihak terkait di sektor transportasi (akademisi, pengamat transportasi, pelaku jasa transportasi, media, dan lainnya) dan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah secara online untuk mendapatkan masukan penyempurnaan rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan.



Tindak lanjut dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah:

1. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam perencanaan program dan penganggaran untuk APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya.
2. Mensinergikan dan menginterpretasikan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan penyusunan Renstra dan perencanaan penganggaran pada 10 Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-NTB.
3. Memadukan dan mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan Provinsi yang berbatasan, yaitu Provinsi Bali dan Provinsi NTT.
4. Mengupayakan sumber-sumber pendanaan pembangunan sektor transportasi dari dana hibah/*grant* dari dalam dan luar negeri yang bersifat tidak mengikat untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan.
5. Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Renstra untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan dan proses pengambilan keputusan terkait strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan pembangunan sektor transportasi di Provinsi NTB.